## PT ESTA MULTI USAHA Tbk

LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2020 SERTA
TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

#### PT ESTA MULTI USAHA Tbk LAPORAN KEUANGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2020 SERTA TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

#### DAFTAR ISI

н	alaman
Surat Pernyataan Direksi	
Laporan Auditor Independen	
Laporan Posisi Keuangan	1 - 3
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	4
Laporan Perubahan Ekuitas	5
Laporan Arus Kas	6
Catatan atas Laporan Keuangan	7 - 62



## PT ESTA MULTI USAHA Tbk

SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN PT ESTA MULTI USAHA TIM UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020 SERTA TAHUN YANG BERAKHIR PADA TAHUN TERSEBUT

#### Kami yang bertanda-tangan di bawah ini:

1. Nama

Lukman Nelam

Alamat kantor

PT Esta Multi Usaha Tbk

Gedung "Wisma D'esta" lantai 7, Komplek Komersial Sektor II Blok AH2 No.7A, Burni Serpong Damai,

Tangerang Selatan, Banten.

Alamat Rumah

Foresta Foglio Blok P 01 No.03, Pagedangan, Tangerang

Telepon Jabatan 021-80634569 Direktur Utama

2 Nama

Survanto Witono

Alamat kantor

PT Esta Multi Usaha Tbk

Gedung "Wisma D'esta" lantai 7, Komplek Komersial Sektor II Blok AH2 No.7A, Burni Serpong Damai,

Tangerang Selatan, Banten.

Alamat Rumah

Ji. Villa Tomang Mas Blok E Kav. 4, RT 004 RW 011, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Telepon

021-80634569

Jabatan

Direktur

#### menyatakan bahwa:

Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Esta Multi Usaha Tbk;

 Laporan keuangan PT Esta Multi Usaha Tbk telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;

a. Semua informasi dalam laporan keuangan PT Esta Multi Usaha Tbk telah dimuat secara lengkap dan benar;

 b. Laporan keuangan PT Esta Multi Usaha Tok tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;

Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PT Esta Multi Usaha Tbk.

Lukman Nelam

Direktur Utama

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Atas nama dan mewakili Direksi

Suryanto Witono Direktur

Jakarta, 21 April 2021

IAAJX140720074



## Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan

Registered Public Accountants No. 854/KM.1/2015

Cyber 2 Tower 20<sup>th</sup> floor Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Jakarta 12950, Indonesia

Main +62 (21) 2553 9200 Fax +62 (21) 2553 9298 www.crowe.id

#### Laporan Auditor Independen

#### Laporan No.00347/2.1051/AU.1/03/1029-2/1/IV/2021

Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi

#### PT ESTA MULTI USAHA Tbk

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Esta Multi Usaha Tbk terlampir, yang terdiri atas laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2020, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas - neto, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lainnya.

#### Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

#### Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian yang material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun oleh kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.



# Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan Registered Public Accountants No. 854/KM.1/2015

#### Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Esta Multi Usaha Tbk tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan, dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

KOSASIH, NURDIYAMAN, MULYADI, TJAHJO & REKAN

Juninho Widjaja, CPA Izin Akuntan Publik No. AP.1029 21 April 2021

#### PT ESTA MULTI USAHA Tbk **LAPORAN POSISI KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2020 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2020	2019
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas Piutang usaha	2c,2d,4,8a,26	25.247.656.375	1.967.186.253
pihak ketiga pihak berelasi	2c,5,26 2e,8b	132.533.093 210.000.000	291.853.558 -
Piutang lain-lain Persediaan	2c 2f,6	- 64.858.745	1.500.000 68.613.972
Pajak dibayar di muka	20,13a	121.245.688	146.330.744
Beban dibayar di muka jangka pendek	2g,7,8c	52.724.770	110.284.250
Uang muka pembelian aset tetap		-	324.078.844
Total Aset Lancar		25.829.018.671	2.909.847.621
ASET TIDAK LANCAR			
Beban dibayar di muka jangka panjang	2g,7,8c 2h,2k,2n,9	-	311.111.094
Aset tetap - neto	15,21,22a 2i,2k,10,15,	30.022.095.873	29.174.302.215
Properti investasi - neto	20,21	18.336.276.323	19.198.541.632
Aset pajak tangguhan - neto	20,13d	2.936.709	75.871.489
Beban emisi saham ditangguhkan	2j		569.702.949
Total Aset Tidak Lancar		48.361.308.905	49.329.529.379
TOTAL ASET		74.190.327.576	52.239.377.000

#### PT ESTA MULTI USAHA Tbk **LAPORAN POSISI KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2020 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2020	2019
LIABILITAS DAN EKUITAS - NETO			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang usaha - pihak ketiga Utang lain-lain - pihak ketiga Beban akrual Utang pajak Pendapatan diterima di muka jangka pendek Utang jangka panjang yang	2c,11,26 2c,26 2c,12,26 2o,13b 2e,8d,14	106.815.093 15.978.998 477.960.527 59.730.708 747.988.346	151.334.284 17.419.123 348.179.680 76.703.064 1.126.255.907
jatuh tempo dalam waktu satu tahun: Utang bank Utang pembiayaan konsumen Total Liabilitas Jangka Pendek	2c,15,26 2c,16,26	1.791.703.406 1.262.383.289 4.462.560.367	1.575.130.225 629.342.727 <b>3.924.365.010</b>
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun: Utang bank	2c.15.26	8.976.143.712	10.780.646.593
Utang pembiayaan konsumen	2c,16,26	1.415.479.015	1.361.175.487
Pendapatan diterima di muka jangka panjang Liabilitas imbalan kerja karyawan Utang pembelian aset tetap	2e,8d,14 2l,17 2c,26	490.462.963 145.000.980 58.525.000	356.203.704 13.800.000 68.025.000
Total Liabilitas Jangka Panjang		11.085.611.670	12.579.850.784
TOTAL LIABILITAS		15.548.172.037	16.504.215.794

# PT ESTA MULTI USAHA Tbk

LAPORAN POSISI KEUANGAN Tanggal 31 Desember 2020 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2020	2019
EKUITAS - NETO  Modal saham - nilai nominal  Rp100 per lembar saham pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019  Modal dasar - 1.688.880.000 lembar saham pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019  Modal ditempatkan dan disetor penuh - 630.000.000 lembar saham pada tanggal 31 Desember 2020 dan 430.000.000 lembar saham pada tanggal 31 Desember 2019  Tambahan modal disetor Defisit	18 1b,2p,13f,19	63.000.000.000 1.741.249.038 (6.099.093.499)	43.000.000.000 500.000.000 (7.764.838.794)
TOTAL EKUITAS - NETO		58.642.155.539	35.735.161.206
LIABILITAS DAN EKUITAS - NETO		74.190.327.576	52.239.377.000

### PT ESTA MULTI USAHA Tbk LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2020	2019
PENDAPATAN	2e,2m,8e,20	8.801.596.151	8.166.969.804
BEBAN POKOK PENDAPATAN	2m,9,10,21	3.150.734.056	3.365.182.235
LABA KOTOR		5.650.862.095	4.801.787.569
BEBAN USAHA Beban umum dan administrasi Beban peralatan, pemeliharaan, dan energi Beban pemasaran  Total Beban Usaha  LABA USAHA	2m 9,17,22a 22b 22c	4.178.828.371 532.364.556 63.958.693 4.775.151.620	3.646.246.203 612.883.256 64.749.094 4.323.878.553 477.909.016
		6/5./10.4/5	477.909.016
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN Pendapatan keuangan Laba penjualan properti investasi Beban keuangan Beban penurunan nilai properti investasi Lain-lain - neto	2m 2i,10 2i,2k,10	1.943.855.537 834.391.214 (1.904.494.336) - (54.756.598)	4.565.242 3.390.300.000 (1.788.702.386) (147.710.000) 8.992.820
Total pendapatan lain-lain - neto		818.995.817	1.467.445.676
LABA SEBELUM MANFAAT PAJAK PENGHASILAN		1.694.706.292	1.945.354.692
MANFAAT PAJAK PENGHASILAN TANGGUHAN	2o,13d	24.739.452	27.084.341
LABA NETO TAHUN BERJALAN		1.719.445.744	1.972.439.033
PENGHASILAN (BEBAN) KOMPREHENSIF LAIN  Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi pada periode selanjutnya: Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja karyawan Beban pajak penghasilan terkait	17	43.973.784 (9.674.232)	91.639.231 (22.909.808)
Penghasilan komprehensif lain - setelah pajak		34.299.552	68.729.423
TOTAL LABA KOMPREHENSIF		1.753.745.296	2.041.168.456
Laba per saham	2r.23	2,90	4,59
Lawa por Janani	21,20		4,55

#### PT ESTA MULTI USAHA Tbk LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS - NETO

# Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	Modal Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh	Tambahan Modal Disetor	Defisit	Total Ekuitas - Neto
Saldo 1 Januari 2019		43.000.000.000	500.000.000	(9.806.007.250)	33.693.992.750
Total laba neto tahun berjalan		-	-	1.972.439.032	1.972.439.032
Penghasilan komprehensif lain: Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja karyawan Beban pajak penghasilan terkait	17	:	- -	91.639.231 (22.909.808)	91.639.231 (22.909.808)
Saldo 31 Desember 2019		43.000.000.000	500.000.000	(7.764.838.795)	35.735.161.205
Dampak penerapan standar akuntansi baru		-	-	(88.000.000)	(88.000.000)
Total laba neto tahun berjalan		-	-	1.719.445.744	1.719.445.744
Penawaran umum perdana saham	19	-	4.000.000.000	-	4.000.000.000
Setoran modal	18	20.000.000.000	-	-	20.000.000.000
Beban emisi saham	1b,19	-	(2.758.750.962)	-	(2.758.750.962)
Penghasilan komprehensif lain: Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja karyawan Beban pajak penghasilan terkait	17	- -	<u>-</u> -	43.973.784 (9.674.232)	43.973.784 (9.674.232)
Saldo 31 Desember 2020		63.000.000.000	1.741.249.038	(6.099.093.499)	58.642.155.539

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

### PT ESTA MULTI USAHA Tbk LAPORAN ARUS KAS

# Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2020	2019
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Penerimaan dari pelanggan Penerimaan dari penghasilan keuangan Pembayaran untuk beban keuangan Pembayaran kepada karyawan Pembayaran kepada pemasok Pembayaran beban usaha dan		8.506.908.314 1.943.855.537 (1.904.494.336) (1.679.466.855) (900.841.410)	8.475.656.438 4.565.242 (1.788.702.386) (1.740.101.755) (1.709.205.538)
kegiatan operasional lainnya Pembayaran pajak penghasilan		(799.366.047) (197.948.752)	(1.846.953.344) (211.262.083)
Arus Kas Neto yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi		4.968.646.451	1.183.996.574
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	40	4.054.054.050	7.500.000.000
Penjualan properti investasi Penambahan uang muka	10	1.251.851.852	7.500.000.000
pembelian aset tetap Penambahan properti investasi	10	(906.353.728) (459.490.624)	(110.753.844)
Perolehan aset tetap Pembayaran utang pembelian aset tetap	9	(16.600.000) (9.500.000)	(3.138.439.764) (1.020.750.000)
Arus Kas Neto yang Diperoleh dari (Digunakan untuk)			
Aktivitas Investasi		(140.092.500)	3.230.056.392
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	18	20.000.000.000	
Peningkatan modal saham Penambahan tambahan modal disetor dari	10		-
penawaran umum perdana saham Pembayaran untuk utang bank jangka panjang		1.241.249.038 (1.732.311.958)	(1.446.337.576)
Pembayaran utang pembiayaan konsumen		(1.057.020.909)	(132.476.787)
Pembayaran kepada pihak berelasi Pembayaran beban emisi saham ditangguhkan		-	(1.249.903.002) (569.702.949)
Arus Kas Neto yang Diperoleh dari (Digunakan untuk)			
Aktivitas Pendanaan		18.451.916.171	(3.398.420.314)
KENAIKAN NETO KAS DAN BANK		23.280.470.122	1.015.632.652
KAS DAN BANK AWAL TAHUN		1.967.186.253	951.553.601
KAS DAN BANK AKHIR TAHUN		25.247.656.375	1.967.186.253

Tanggal 31 Desember 2020 Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

#### 1. UMUM

#### a. Pendirian dan Informasi Umum Perusahaan

PT Esta Multi Usaha Tbk ("Perusahaan") didirikan dengan nama PT Esta Asri Propertindo sesuai Akta Notaris Kun Hidayat, SH., No. 34 tanggal 30 September 2011, notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-51610.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 24 Oktober 2011, telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. AHU-0085684.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 24 Oktober 2011, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 93 tanggal 20 November 2012. Perusahaan mengubah nama menjadi PT Esta Multi Usaha berdasarkan Akta Notaris Maichel Vecky Katuuk, S.H., M.Kn. No. 7 tanggal 15 Mei 2019, perubahan ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0266076 tanggal 20 Mei 2019 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 065 tanggal 13 Agustus 2019.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir diaktakan dengan Akta Notaris No. 47 oleh Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., tanggal 18 September 2019 mengenai perubahan status Perusahaan dari Perusahaan Tertutup menjadi Perusahaan Terbuka dan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan untuk disesuaikan dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. AHU-0073384.AH.01.02.Tahun 2019.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan utama Perusahaan adalah di bidang penyediaan akomodasi dengan penyediaan makan minum meliputi hotel bintang dua, dengan kegiatan usaha penunjang melakukan usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estat, melakukan kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha kendaraan tanpa hak opsi dan melakukan perdagangan. Perusahaan berkedudukan di Gedung "Wisma D'esta" lantai 7, Komplek Komersial Sektor II Blok AH.2/7A, Bumi Serpong Damai, Tangerang Selatan, Banten. Perusahaan mulai melakukan kegiatan usaha secara komersial pada tahun 2012. Sampai dengan tahun 2017, Perusahaan hanya melakukan kegiatan usaha penyewaan real estat. Pada tahun 2018, Perusahaan memulai kegiatan usaha penyewaan kendaraan tanpa hak opsi.

Perusahaan memiliki bangunan hotel yang dioperasikan dengan nama D'esta Hotel 88 yang berletak di Jalan Cut Meutia No. 67, RT 01/02, Kel. Sepanjang Jaya, Kec. Rawa Lumbu, Bekasi.

Entitas induk langsung dan utama Perusahaan adalah PT Esta Utama Corpora.

#### b. Penawaran Umum Perdana Saham

Pada tanggal 28 Februari 2020, Perusahaan memperoleh Surat Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran No. S-82/D.04/2020 dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat sebanyak 200.000.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal Rp100 per saham dan harga penawaran Rp120 per saham.

Saham-saham tersebut seluruhnya telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia tanggal 9 Maret 2020. Dana yang diperoleh Perusahaan dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham, setelah dikurangi dengan bebanbeban emisi sebesar Rp1.241.249.038 dipergunakan untuk meningkatkan modal kerja, pembangunan hotel, dan peningkatan jumlah kendaraan (Catatan 19).

#### c. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit dan Karyawan

Berdasarkan Akta Notaris Syarifudin S.H., nomor 19 tanggal 31 Agustus 2020 susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

**Dewan Komisaris** 

Komisaris Utama : Melvin Wangkar Komisaris : Rony Harianto

Komisaris Independen : Drs. Alkie Samuel Sutandra

<u>Direksi</u>

Direktur Utama : Lukman Nelam Direktur : Suryanto Witono

#### Tanggal 31 Desember 2020 Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

#### 1. UMUM (lanjutan)

#### c. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit dan Karyawan (lanjutan)

Berdasarkan Akta Notaris Elizabeth Karine Leonita, S.H., M.Kn., nomor 47 tanggal 18 September 2019 susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

**Dewan Komisaris** 

Komisaris Utama : Melvin Wangkar Komisaris : Rony Harianto

Komisaris Independen : Drs. Alkie Samuel Sutandra

Direksi

Direktur Utama : Lukman Nelam

Direktur : Yosef Ervin Riadi Oedi Tjahjadi

Manajemen kunci Perusahaan mencakup Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan. Komisaris Perusahaan bertugas melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha Perusahaan yang dibawahi oleh Direksi. Sedangkan direksi bertugas menjalankan kegiatan usaha Perusahaan dengan pembagian direktur utama yang membawahi bidang operasional, direktur yang membawahi bidang akuntansi dan keuangan serta direktur yang membawahi bidang sumber daya manusia.

Gaji dan tunjangan yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp112.000.000 dan Rp344.746.200.

Pada tanggal 16 September 2019, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan No. 001/SK-DIR/EMU/X/19, Perusahaan menunjuk Aldy Abdurrachman Saleh sebagai Sekretaris Perusahaan.

Pada tanggal 16 September 2019, berdasarkan Surat Keputusan Komisaris Perusahaan No. 001/SK-KOM/EMU/IX/19, Perusahaan menunjuk komite audit Perusahaan sebagai berikut:

Ketua Komite Audit : Drs. Alkie Samuel Sutandra

Anggota Komite : Tony Sompotan Anggota Komite : Sandi Komarudin

Pada tanggal 18 September 2019, berdasarkan Surat Keputusan Komisaris Perusahaan No. 001/SK-KOM/EMU/IX/19, Perusahaan menunjuk Irnanda Aditya Cornelius sebagai Audit Internal Perusahaan.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Perusahaan memiliki masing-masing sejumlah 12 dan 11 karyawan tetap (tidak diaudit).

#### d. Penyelesaian Laporan Keuangan

Manajemen Perusahaan, yang diwakili oleh Direksi, bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan ini yang telah diselesaikan dan diotorisasi untuk diterbitkan oleh manajemen Perusahaan pada tanggal 21 April 2021.

#### 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN

#### a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (SAK), yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada dibawah pengawasannya.

Tanggal 31 Desember 2020 Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

#### 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

#### a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan (lanjutan)

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan adalah selaras dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, kecuali bagi penerapan beberapa SAK yang telah direvisi. Seperti diungkapkan dalam Catatan-Catatan terkait atas laporan keuangan, beberapa standar akuntansi yang telah direvisi dan diterbitkan, diterapkan efektif tanggal 1 Januari 2020.

Laporan keuangan kecuali untuk laporan arus kas, disusun berdasarkan konsep akrual dan dasar pengukuran dengan menggunakan konsep harga historis, kecuali beberapa akun tertentu yang disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area dimana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan diungkapkan di Catatan 3.

#### b. Klasifikasi Lancar dan Tidak Lancar

Perusahaan menyajikan aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan berdasarkan klasifikasi lancar atau tidak lancar. Suatu aset disajikan lancar bila:

- i) akan direalisasi, dijual atau dikonsumsi dalam siklus operasi normal,
- ii) untuk diperdagangkan,
- iii) akan direalisasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau kas atau setara kas kecuali yang dibatasi penggunaannya atau akan digunakan untuk melunasi suatu liabilitas dalam paling lambat 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Seluruh aset lain diklasifikasikan sebagai tidak lancar.

Suatu liabilitas disajikan lancar bila:

- i) akan dilunasi dalam siklus operasi normal,
- ii) untuk diperdagangkan,
- iii) akan dilunasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau
- iv) tidak ada hak tanpa syarat untuk menangguhkan pelunasannya dalam paling tidak 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Seluruh liabilitas lain diklasifikasikan sebagai tidak lancar.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diklasifikasikan sebagai aset dan liabilitas tidak lancar.

#### c. Instrumen Keuangan

Perusahaan menerapkan PSAK 71, "Instrumen Keuangan" efektif mulai tanggal 1 Januari 2020. PSAK 71 menggantikan ketentuan PSAK 55 yang terkait dengan pengakuan, klasifikasi dan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan, penghentian pengakuan instrumen keuangan, penurunan nilai aset keuangan dan akuntansi lindung nilai.

Tanggal 31 Desember 2020 Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

#### 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

#### c. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Amandemen tersebut mengharuskan instrumen utang diukur baik pada biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVOCI) atau nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL). Klasifikasi instrumen utang, tergantung pada model bisnis entitas untuk mengelola aset keuangan dan apakah arus kas kontraktual hanya mewakili pembayaran pokok dan bunga (SPPI). Model bisnis entitas adalah bagaimana entitas mengelola aset keuangannya untuk menghasilkan arus kas dan menciptakan nilai bagi entitas baik dari mengumpulkan arus kas kontraktual, menjual aset keuangan, atau keduanya. Jika instrumen utang dimiliki untuk mengumpulkan arus kas kontraktual, diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika juga memenuhi persyaratan SPPI. Instrumen utang yang memenuhi persyaratan SPPI yang dimiliki untuk mengumpulkan arus kas kontraktual aset dan untuk menjual aset diukur di FVOCI. Aset keuangan diukur pada FVTPL jika tidak memenuhi kriteria FVOCI atau biaya perolehan diamortisasi.

Penerapan PSAK 71 mengakibatkan perubahan pada kebijakan akuntansi dan penyesuaian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang berhubungan dengan klasifikasi dan pengukuran, dan penurunan aset keuangan telah diubah untuk mematuhi standar ini, PSAK 71 efektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020, dan Perusahaan mengadopsi PSAK 71 menggunakan metode retrospektif yang dimodifikasi. Dalam metode ini, angka komparatif tidak disajikan kembali dan dampak keuangan dari adopsi standar diakui dalam laba ditahan sebagai penyesuaian pada tanggal 1 Januari 2020.

Penilaian model bisnis dan apakah aset keuangan memenuhi persyaratan SPPI dibuat pada 1 Januari 2020, dan kemudian diterapkan secara retrospektif pada aset keuangan yang tidak dihentikan pengakuannya sebelum 1 Januari 2020.

Instrumen keuangan Perusahaan memiliki arus kas kontraktual yang semata-mata merupakan pembayaran pokok dan bunga. Perusahaan memiliki aset keuangan saat ini untuk mengumpulkan arus kas kontraktual, dan karenanya diukur pada biaya perolehan diamortisasi ketika menerapkan PSAK 71.

PSAK 71 mengharuskan semua instrumen ekuitas dilakukan pada FVTPL, kecuali jika entitas memilih pengakuan awal, untuk menyajikan perubahan nilai wajar dalam penghasilan komprehensif lain.

PSAK 71 mengharuskan Perusahaan untuk mencatat kerugian kredit ekspektasian (ECL) pada semua aset keuangannya yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau FVOCI dan jaminan keuangan. Perusahaan sebelumnya mencatat penurunan nilai berdasarkan model kerugian yang terjadi ketika terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai.

Efektif tanggal 1 Januari 2020, Perusahaan menerapkan Amandemen PSAK 71, "Instrumen Keuangan", Amandemen PSAK 55, "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" dan Amandemen PSAK 60, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan" tentang Reformasi Acuan Suku Bunga sebagai hasil adopsi dari *Interest Rate Benchmark Reform* - Amandemen IFRS 9, IAS 39 dan IFRS 7.

Amandemen ini memberikan kelonggaran atas potensi dampak ketidakpastian yang disebabkan oleh *Interest Rate Benchmark Reform* ("IBOR Reform") dengan memberikan pengecualian terhadap persyaratan akuntansi lindung nilai dalam PSAK 71 dan PSAK 55. Nilai, dan/atau acuan tingkat suku bunga yang menjadi acuan. dasar arus kas instrumen lindung nilai, tidak berubah sebagai akibat dari reformasi IBOR. Secara garis besar, amandemen ini mengatur:

- Persyaratan yang sangat mungkin untuk lindung nilai arus kas.
- Penilaian prospektif PSAK 71 dan penilaian retrospektif PSAK 55,
- Penentuan komponen risiko yang diidentifikasi secara terpisah,
- Penerapan amandemen ini bersifat wajib dan akan berlaku untuk jangka waktu terbatas,
- Pengungkapan.

Tanggal 31 Desember 2020 Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

#### 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

#### c. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penerapan Amandemen PSAK 71, "Instrumen Keuangan", Amandemen PSAK 55, "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" dan Amandemen PSAK 60, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan" tentang Reformasi Acuan Suku Bunga tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap laporan keuangan.

#### Klasifikasi

Perusahaan mengklasifikasikan instrumen keuangan menjadi aset keuangan dan liabilitas keuangan. Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang menimbulkan aset keuangan pada satu entitas dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas pada entitas lain.

#### Dari tanggal 1 Januari 2020

#### (i) Aset Keuangan

Aset keuangan diklasifikasikan pada saat pengakuan awal dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi, FVOCI, dan FVTPL.

Aset keuangan Perusahan terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha - pihak ketiga dan pihak berelasi dan piutang lain-lain diklasifikasikan sebagai aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi.

#### (ii) Liabilitas Keuangan

Perusahaan mengklasifikasikan liabilitas keuangannya sebagai (i) liabilitas keuangan diukur pada FVTPL atau (ii) liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Liabilitas keuangan Perusahan terdiri atas utang usaha - pihak ketiga, utang lain-lain - pihak ketiga, utang bank jangka panjang, beban akrual, utang pembiayaan konsumen, dan utang pembelian aset tetap diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi.

#### Sebelum tanggal 1 Januari 2020

#### (i) Aset Keuangan

Aset keuangan dalam lingkup PSAK No. 55 (Revisi 2014) diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi dimiliki hingga jatuh tempo, atau aset keuangan tersedia untuk dijual, mana yang sesuai. Perusahaan menentukan klasifikasi atas aset keuangan pada saat pengakuan awal, dan jika diperbolehkan dan sesuai, mengevaluasi kembali pengklasifikasian aset tersebut pada setiap akhir periode keuangan.

Aset keuangan Perusahaan terdiri dari kas dan bank, piutang usaha - pihak ketiga dan piutang lain-lain yang diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang.

#### (ii) Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK No. 55 (Revisi 2014) diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi. Perusahaan menentukan klasifikasi atas liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

Tanggal 31 Desember 2020 Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

#### 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

#### c. Instrumen Keuangan (lanjutan)

#### Klasifikasi (lanjutan)

#### Sebelum tanggal 1 Januari 2020 (lanjutan)

(ii) Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Liabilitas keuangan Perusahaan terdiri dari utang usaha - pihak ketiga, utang lain-lain - pihak ketiga, beban akrual, utang bank jangka panjang, utang pembiayaan konsumen, dan utang pembelian aset tetap yang diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi.

#### Pengakuan dan Pengukuran

#### Dari tanggal 1 Januari 2020

#### (i) Aset Keuangan

Klasifikasi aset keuangan pada pengakuan awal tergantung pada karakteristik arus kas kontraktual aset keuangan dan model bisnis Perusahaan dalam mengelola aset keuangan tersebut. Kecuali untuk piutang usaha yang tidak memiliki komponen pendanaan yang signifikan dan atau saat Perusahaan menerapkan panduan praktis, pada saat pengakuan awal Perusahaan mengukur aset keuangan pada nilai wajarnya ditambah, dalam hal aset keuangan tidak diukur pada FVTPL, biaya transaksi. Untuk piutang usaha yang tidak memiliki komponen pendanaan yang signifikan atau ketika Perusahaan menerapkan panduan praktis, diukur sesuai harga transaksi seperti yang didefinisikan dalam PSAK 72.

Agar dapat diklasifikasikan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau FVOCI, aset keuangan harus memiliki arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang. Pengujian ini dikenal sebagai *SPPI testing* dan dilakukan pada tingkat instrumen.

Model bisnis Perusahaan dalam mengelola aset keuangan mengacu kepada bagaimana Perusahaan mengelola aset keuangan untuk menghasilkan arus kas. Model bisnis menentukan apakah arus kas akan dihasilkan dari memperoleh arus kas kontraktual, menjual aset keuangan atau keduanya.

Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam kurun waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar (pembelian yang lazim) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal Perusahaan berkomitmen untuk membeli atau menjual aset tersebut.

Pengukuran aset keuangan tergantung pada klasifikasinya sebagai berikut:

(a) Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (instrumen keuangan)

Kategori ini merupakan yang paling relevan bagi Perusahaan. Perusahan mengukur aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Tanggal 31 Desember 2020 Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

#### 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

#### c. Instrumen Keuangan (lanjutan)

#### Pengakuan dan Pengukuran (lanjutan)

#### Dari tanggal 1 Januari 2020 (lanjutan)

- (i) Aset Keuangan (lanjutan)
  - (a) Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (instrumen keuangan) (lanjutan)

Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi selanjutnya diukur dengan menggunakan metode suku bunga efektif (EIR). Keuntungan dan kerugian diakui sebagai laba rugi pada saat pinjaman yang diberikan dan piutang dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, dimodifikasi, serta melalui proses amortisasi.

#### (ii) Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan diklasifikasikan, pada pengakuan awal, sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, pinjaman, atau sebagai derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dalam lindung nilai yang efektif, jika sesuai.

Semua liabilitas keuangan pada awalnya diakui pada nilai wajar, dan untuk pinjaman sebesar pinjaman yang diterima setelah dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Instrumen keuangan yang diterbitkan atau komponen dari instrumen keuangan tersebut,yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan lain-lain,jika substansi perjanjian kontraktual mengharuskan Perusahaan untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada pemegang instrumen keuangan, atau jika liabilitas tersebut diselesaikan tidak melalui penukaran kas atau aset keuangan lain atau saham sendiri yang jumlahnya tetap atau telah ditetapkan.

Pengukuran liabilitas keuangan tergantung pada klasifikasinya sebagai berikut:

(a) Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Kategori ini merupakan yang paling relevan bagi Perusahaan. Setelah pengakuan awal, pinjaman diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode EIR.

Keuntungan dan kerugian diakui dalam laba rugi hingga liabilitas dihentikan pengakuannya melalui proses amortisasi menggunakan metode EIR.

Biaya perolehan dimortisasi dihitung dengan mempertimbangkan setiap diskon atau premi pada perolehan awal dan biaya yang merupakan bagian integral dari metode EIR. Amortisasi metode EIR diakui sebagai "Beban keuangan" pada laba rugi.

#### Sebelum tanggal 1 Januari 2020

#### (i) Aset Keuangan

Aset keuangan pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya dalam hal investasi yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengukuran aset keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasi aset.

Pembelian atau penjualan aset keuangan yang mensyaratkan penyerahan aset dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar (pembelian yang lazim/reguler) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal Perusahaan berkomitmen untuk membeli atau menjual aset tersebut.

Tanggal 31 Desember 2020 Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

#### 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

#### c. Instrumen Keuangan (lanjutan)

#### Pengakuan dan Pengukuran (lanjutan)

#### Sebelum tanggal 1 Januari 2020 (lanjutan)

#### (i) Aset Keuangan (lanjutan)

#### Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan nonderivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Setelah pengakuan awal, aset keuangan tersebut dicatat pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif kecuali jika dampak diskonto tidak material, maka dinyatakan pada biaya perolehan.

Keuntungan atau kerugian diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain ketika aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, dan melalui proses amortisasi.

#### (i) Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan diakui pada awalnya sebesar nilai wajar, dalam hal pinjaman dan utang, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

#### Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, selanjutnya setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi, menggunakan suku bunga efektif kecuali jika dampak diskonto tidak material, maka dinyatakan pada biaya perolehan. Beban bunga diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Keuntungan atau kerugian diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain ketika liabilitas keuangan tersebut dihentikan pengakuannya dan melalui proses amortisasi.

#### Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai netonya dilaporkan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dan terdapat maksud untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

#### Nilai Wajar dari Instrumen Keuangan

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan secara aktif di pasar keuangan yang terorganisasi, jika ada, ditentukan dengan mengacu pada kuotasi harga penawaran atau permintaan (bid or ask prices) pada penutupan perdagangan pada akhir periode pelaporan.

Untuk instrumen keuangan yang tidak memiliki pasar aktif, nilai wajar ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian mencakup penggunaan transaksi pasar terkini yang dilakukan secara wajar oleh pihak-pihak yang berkeinginan dan memahami (recent arm's length market transactions); penggunaan nilai wajar terkini instrumen lain yang secara substansial sama; analisa arus kas yang didiskonto; atau model penilaian lain.

Bila nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif tidak dapat ditentukan secara handal, aset keuangan tersebut diakui dan diukur pada nilai tercatatnya.

Tanggal 31 Desember 2020 Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

#### 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

#### c. Instrumen Keuangan (lanjutan)

#### Biaya Perolehan Diamortisasi dari Instrumen Keuangan

Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan penyisihan atas penurunan nilai dan pembayaran pokok atau nilai yang tidak dapat ditagih. Perhitungan tersebut mempertimbangkan premium atau diskonto pada saat perolehan dan termasuk biaya transaksi dan biaya yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif.

#### Penurunan Nilai Aset Keuangan

#### Dari tanggal 1 Januari 2020

Perusahan mengakui cadangan untuk ECL terkait dengan instrumen hutangnya utang yang tidak diklasifikasikan sebagai diukur pada FVTPL. Kerugian kredit ekspektasian didasarkan pada perbedaan antara arus kas kontraktual yang jatuh tempo sesuai dengan kontrak dan semua arus kas yang diharapkan akan diterima oleh Perusahan, didiskontokan berdasarkan perkiraan EIR awal. Arus kas yang diharapkan akan mencakup arus kas dari penjualan agunan yang dimiliki atau peningkatan kredit lainnya yang merupakan bagian integral dari ketentuan kontraktual.

ECL diakui dalam dua tahap. Untuk risiko kredit atas instrumen keuangan yang tidak mengalami peningkatan secara signifikan sejak pengakuan awal, pengukuran penyisihan kerugian dilakukan sejumlah ECL 12 bulan. Untuk risiko kredit atas instrumen keuangan yang mengalami peningkatan secara signifikan sejak pengakuan awal, penyisihan kerugian dilakukan sepanjang sisa umurnya, terlepas dari waktu terjadinya default (sepanjang umur ECL).

Untuk piutang usaha, Perusahaan menerapkan panduan praktis dalam menghitung ECL. Oleh karena itu, Perusahaan tidak mengidentifikasi perubahan dalam risiko kredit, melainkan mengukur penyisihan kerugian sejumlah ECL sepanjang umur. Perusahaan telah membentuk matriks provisi yang didasarkan pada data historis kerugian kredit, disesuaikan dengan faktor-faktor perkiraan masa depan (forward-looking) khusus terkait pelanggan dan lingkungan ekonomi.

Jumlah kerugian atau pembalikan penyisihan kerugian kredit ekspektasian yang diharapkan diakui sebagai kerugian penurunan nilai atau keuntungan dalam laba rugi dan disajikan secara terpisah dari yang lain jika material.

#### Sebelum tanggal 1 Januari 2020

Setiap akhir periode pelaporan, Perusahaan mengevaluasi apakah terdapat bukti yang objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi jika, dan hanya jika, terdapat bukti yang obyektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

#### Aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi

Untuk aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, Perusahaan pertama kali menentukan apakah terdapat bukti objektif mengenai adanya penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual atau untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual terdapat bukti penurunan nilai secara kolektif.

Tanggal 31 Desember 2020 Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

#### 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

#### c. Instrumen Keuangan (lanjutan)

#### Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

#### Sebelum tanggal 1 Januari 2020 (lanjutan)

Jika Perusahaan menentukan tidak terdapat bukti objektif mengenai adanya penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka Perusahaan memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya dinilai secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Jika terdapat bukti objektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi, jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang (tidak termasuk ekspektasi kerugian kredit masa datang yang belum terjadi). Nilai kini estimasi arus kas masa datang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Jika pinjaman yang diberikan dan piutang memiliki suku bunga variabel, tingkat diskonto untuk mengukur kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif terkini. Nilai tercatat aset tersebut berkurang melalui penggunaan akun penyisihan dan jumlah kerugian diakui dalam laba rugi.

Ketika aset tidak tertagih, nilai tercatat atas aset keuangan yang telah diturunkan nilainya dikurangi secara langsung atau jika ada suatu jumlah telah dibebankan ke akun cadangan penurunan nilai jumlah tersebut dihapusbukukan terhadap nilai tercatat aset keuangan tersebut.

Jika, pada periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan penurunan nilai tersebut diakui, maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui dipulihkan, sepanjang nilai tercatat aset tidak melebihi biaya perolehan diamortisasi pada tanggal pemulihan dengan menyesuaikan akun cadangan. Jumlah pemulihan aset keuangan diakui pada laporan laba rugi.

Penerimaan kemudian atas piutang yang telah dihapusbukukan sebelumnya, jika pada periode berjalan dikreditkan dengan menyesuaikan pada akun cadangan penurunan nilai, sedangkan jika setelah akhir periode pelaporan dikreditkan sebagai pendapatan operasional lainnya.

#### Penghentian Pengakuan

#### (i) Aset Keuangan

Suatu aset keuangan, atau mana yang berlaku, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan sejenis, dihentikan pengakuannya pada saat:

- (a) hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau mentransfer pengendalian atas aset.
- (b) Perusahaan mentransfer hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau menanggung kewajiban untuk membayar arus kas yang diterima tanpa penundaan yang signifikan kepada pihak ketiga melalui suatu kesepakatan penyerahan dan (i) secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, atau (ii) secara substansial tidak mentransfer dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

Ketika Perusahaan telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari aset atau telah menandatangani kesepakatan pelepasan (pass-through arrangement), dan secara substansial tidak mentransfer dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, maupun mentransfer pengendalian atas aset, aset tersebut diakui sejauh keterlibatan berkelanjutan Perusahaan terhadap aset keuangan tersebut. Keterlibatan berkelanjutan yang berbentuk pemberian jaminan atas aset yang ditransfer diukur sebesar jumlah terendah dari jumlah tercatat aset dan jumlah maksimal dari pembayaran yang diterima Perusahaan yang mungkin harus dibayar kembali.

Tanggal 31 Desember 2020 Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

#### 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

#### c. Instrumen Keuangan (lanjutan)

### Penghentian Pengakuan (lanjutan)

#### (i) Aset Keuangan (lanjutan)

Dalam hal ini, Perusahaan juga mengakui liabilitas terkait. Aset yang ditransfer dan liabilitas terkait diukur dengan dasar yang mencerminkan hak dan liabilitas yang masih dimiliki Perusahaan.

Pada saat penghentian pengakuan atas aset keuangan secara keseluruhan, maka selisih antara nilai tercatat dan jumlah dari (i) pembayaran yang diterima, termasuk setiap aset baru yang diperoleh dikurangi setiap liabilitas baru yang harus ditanggung; dan (ii) setiap keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui secara langsung dalam ekuitas harus diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

#### (ii) Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dihentikan atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

Ketika liabilitas keuangan saat ini digantikan dengan yang lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, atau modifikasi secara substansial atas ketentuan liabilitas keuangan yang saat ini ada, maka pertukaran atau modifikasi tersebut dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru, dan selisih antara nilai tercatat liabilitas keuangan tersebut diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

#### d. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas dalam laporan posisi keuangan terdiri atas kas di tangan, kas di bank dan deposito jangka pendek yang dapat segera dikonversikan menjadi kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan, tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman serta tidak dibatasi penggunaannya.

#### e. Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Perusahaan:

- a. Orang atau anggota keluarga dekatnya yang mempunyai relasi dengan Perusahaan jika orang tersebut:
  - (i) memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas Perusahaan;
  - (ii) memiliki pengaruh signifikan atas Perusahaan; atau
  - (iii) personil manajemen kunci Perusahaan atau entitas induk Perusahaan.
- b. Suatu entitas berelasi dengan Perusahaan jika memenuhi salah satu hal berikut:
  - (i) entitas dan Perusahaan adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lainnya);
  - satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
  - (iii) kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
  - (iv) satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
  - entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan Perusahaan;
  - (vi) entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf a);
  - (vii) orang yang diidentifikasi dalam huruf a) i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas); atau
  - (viii) entitas, atau anggota dari kelompok dimana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada Perusahaan atau kepada entitas induk dari Perusahaan.

Tanggal 31 Desember 2020 Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

#### 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

#### e. Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi (lanjutan)

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak. Beberapa persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan persyaratan yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan.

#### f. Persediaan

Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi bersih. Biaya perolehan persediaan Perusahaan ditentukan dengan menggunakan metode *first-in, first-out* (FIFO). Nilai realisasi bersih ditentukan berdasarkan taksiran harga jual dalam kegiatan usaha normal setelah dikurangi dengan taksiran beban yang diperlukan untuk menyelesaikan dan menjual persediaan tersebut. Penyisihan untuk penurunan nilai persediaan dan persediaan usang ditentukan berdasarkan penelaahan atas kondisi persediaan pada akhir tahun untuk menyesuaikan nilai persediaan ke nilai realisasi bersih.

Penyisihan untuk penurunan nilai persediaan dan persediaan usang, jika ada, ditentukan berdasarkan penelaahan atas kondisi persediaan pada akhir tahun untuk menyesuaikan nilai persediaan ke nilai realisasi bersih.

#### g. Beban Dibayar di Muka

Beban dibayar di muka diamortisasi selama manfaat masing-masing beban dengan menggunakan metode garis lurus dan dibebankan selama umur manfaatnya.

#### h. Aset Tetap

Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai. Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Selanjutnya, pada saat inspeksi yang signifikan dilakukan, biaya inspeksi itu diakui ke dalam jumlah tercatat aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya perbaikan dan pemeliharaan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laporan laba rugi pada saat terjadinya.

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap, sebagai berikut:

	Tahun
Bangunan	20
Kendaraan	4 - 8
Perlengkapan	4 - 8
Perabotan	1

Tanah dinyatakan berdasarkan harga perolehan dan tidak disusutkan. Biaya pengurusan legal hak atas tanah ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset tanah. Biaya pengurusan perpanjangan atau pembaharuan legal hak atas tanah diakui sebagai aset tak berwujud dan diamortisasi sepanjang umur hukum hak atau umur ekonomis tanah, mana yang lebih pendek.

Setelah penerapan PSAK 73, Perusahaan menganalisa fakta dan keadaan untuk masing-masing jenis hak atas tanah dalam menentukan akuntansi untuk masing-masing hak atas tanah tersebut sehingga dapat merepresentasikan dengan tepat suatu kejadian atau transaksi ekonomik yang mendasarinya. Jika hak atas tanah tersebut tidak mengalihkan pengendalian atas aset pendasar kepada Perusahaan, melainkan mengalihkan hak untuk menggunakan aset pendasar, Perusahaan menerapkan perlakuan akuntansi atas transaksi tersebut sebagai sewa berdasarkan PSAK 73, "Sewa". Jika hak atas tanah secara substansi menyerupai pembelian tanah, maka Perusahaan menerapkan PSAK 16 "Aset Tetap".

Tanggal 31 Desember 2020 Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

#### 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

#### h. Aset Tetap (lanjutan)

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset diakui dalam laporan laba rugi pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Aset tetap dalam pembangunan dinyatakan sebesar biaya perolehan dan disajikan sebagai bagian dari aset tetap. Akumulasi biaya perolehan aset tetap dalam pembangunan akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dikerjakan dan siap digunakan.

Nilai residu, estimasi masa manfaat dan metode penyusutan direviu dan disesuaikan setiap akhir tahun, bila diperlukan.

#### i. Properti Investasi

Properti investasi Perusahaan terdiri dari tanah, bangunan, dan perlengkapan yang dikuasai Perusahaan untuk menghasilkan sewa atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk tujuan administratif atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.

Properti investasi berupa tanah diakui sebesar harga perolehan dan tidak disusutkan.

Properti investasi bangunan dinyatakan sebesar biaya perolehan termasuk biaya transaksi dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai. Jumlah tercatat termasuk bagian biaya penggantian dari properti investasi yang ada pada saat terjadinya biaya, jika kriteria pengakuan terpenuhi, dan tidak termasuk biaya harian penggunaan properti investasi.

Penyusutan properti investasi bangunan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat bangunan selama 20 tahun.

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomis di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi diakui dalam laba rugi dalam tahun terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.

Transfer ke properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan berakhirnya pemakaian oleh pemilik, dimulainya sewa operasi ke pihak lain atau selesainya pembangunan atau pengembangan. Transfer dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan dimulainya penggunaan oleh pemilik atau dimulainya pengembangan untuk dijual.

Untuk transfer dari properti investasi ke properti yang digunakan sendiri, Perusahaan menggunakan metode biaya pada tanggal perubahan penggunaan. Jika properti yang digunakan sendiri oleh Perusahaan menjadi properti investasi, Perusahaan mencatat properti tersebut sesuai dengan kebijakan aset tetap sampai dengan saat tanggal terakhir perubahan penggunaannya.

#### j. Beban Emisi Saham Ditangguhkan

Beban-beban yang berhubungan secara langsung dengan rencana penawaran umum perdana saham Perusahaan ditangguhkan dan akan dikurangkan dengan akun tambahan modal disetor yang timbul dari selisih antara harga penawaran umum perdana dengan nilai nominal saham (jika ada).

Tanggal 31 Desember 2020 Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

#### 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

#### k. Penurunan Nilai Aset Nonkeuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Perusahaan menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat pengujian penurunan nilai aset diperlukan, maka Perusahaan membuat estimasi formal jumlah terpulihkan aset tersebut.

Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset individual adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau Unit Penghasil Kas (UPK) dikurangi biaya untuk menjual dengan nilai pakainya, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset atau kelompok aset lain. Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai terpulihkannya. Rugi penurunan nilai dari operasi yang dilanjutkan diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sebagai rugi penurunan nilai.

Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan bersih didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar terkini atas nilai waktu dari uang dan risiko spesifik dari aset. Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, digunakan harga penawaran pasar terakhir, jika tersedia. Jika tidak terdapat transaksi tersebut, Perusahaan menggunakan model penilaian yang sesuai untuk menentukan nilai wajar aset. Perhitungan-perhitungan ini dikuatkan oleh penilaian berganda atau indikasi nilai wajar yang tersedia.

Penilaian dilakukan pada akhir setiap periode pelaporan apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk suatu aset mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi dimaksud ditemukan, maka entitas mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut.

Kerugian penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk suatu aset dibalik hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Dalam hal ini, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah terpulihkannya. Pembalikan tersebut dibatasi sehingga jumlah tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun jumlah tercatat, neto setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

#### I. Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan

#### Manfaat imbalan pasti

Perusahaan mengakui kewajiban imbalan kerja yang tidak didanai sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003, tanggal 25 Maret 2003.

Beban pensiun berdasarkan program dana pensiun manfaat pasti Perusahaan ditentukan melalui perhitungan aktuaria secara periodik dengan menggunakan metode *projected-unit credit* dan menerapkan asumsi atas tingkat diskonto, hasil atas aset program dan tingkat kenaikan manfaat pasti pensiun tahunan.

Pengukuran kembali, terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, perubahan dampak batas atas aset (jika ada) dan dari imbal hasil atas aset program (tidak termasuk bunga), yang tercermin langsung dalam laporan posisi keuangan yang dibebankan atau dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain periode terjadinya untuk mencerminkan nilai penuh dari defisit dan surplus program. Pengukuran kembali diakui dalam penghasilan komprehensif lain tercermin segera dalam saldo laba dan tidak akan direklasifikasi ke laba rugi.

Seluruh biaya jasa lalu diakui pada saat yang lebih dulu antara ketika amandemen/kurtailmen terjadi atau ketika biaya restrukturisasi atau pemutusan hubungan kerja diakui.

Tanggal 31 Desember 2020 Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

#### 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

#### I. Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan (lanjutan)

Manfaat imbalan pasti (lanjutan)

Bunga neto dihitung dengan menggunakan tingkat diskonto terhadap liabilitas atau aset imbalan pasti neto. Biaya imbalan pasti dikategorikan sebagai berikut:

- Biaya jasa (termasuk biaya jasa kini, biaya jasa lalu serta keuntungan dan kerugian kurtailmen dan penyelesaian)
- Beban atau pendapatan bunga neto
- Pengukuran kembali.

Perusahaan menyajikan dua komponen pertama dari biaya imbalan pasti di laba rugi. Keuntungan dan kerugian kurtailmen dicatat sebagai biaya jasa lalu.

#### m. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Perusahaan menerapkan PSAK 72, "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan" efektif mulai 1 Januari 2020.

PSAK 72 menetapkan satu model komprehensif untuk digunakan entitas dalam akuntansi untuk pendapatan yang timbul dari kontrak dengan pelanggan. Pada saat berlaku efektif, PSAK 72 akan menggantikan panduan pengakuan pendapatan saat ini termasuk PSAK 23, "Pendapatan", PSAK 34, "Kontrak Konstruksi" dan interpretasi terkait.

Prinsip utama PSAK 72 adalah bahwa entitas harus mengakui pendapatan untuk menggambarkan pengalihan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan dalam jumlah yang mencerminkan imbalan yang diperkirakan menjadi hak entitas dalam pertukaran dengan barang atau jasa tersebut. Secara khusus, Standar memperkenalkan pendekatan 5 langkah untuk pengakuan pendapatan:

- 1) Identifikasi kontrak dengan pelanggan;
- 2) Identifikasi kewajiban kinerja dalam kontrak;
- 3) Tentukan harga transaksi;
- 4) Mengalokasikan harga transaksi untuk kewajiban kinerja dalam kontrak; dan
- 5) Mengakui pendapatan ketika (atau saat) entitas memenuhi kewajiban kinerja.

Berdasarkan PSAK 72, entitas mengakui pendapatan ketika (atau pada saat) kewajiban pelaksanaan terpenuhi, yaitu ketika pengendalian barang atau jasa yang mendasari kewajiban pelaksanaan tertentu dialihkan ke pelanggan.

Standar tersebut mengharuskan entitas untuk melakukan pertimbangan, dengan mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang relevan saat menerapkan setiap langkah model untuk kontrak dengan pelanggan mereka. Standar ini juga menentukan bagaimana memperhitungkan biaya tambahan untuk memperoleh kontrak dan biaya yang terkait langsung dengan pemenuhan kontrak. Persyaratan pengungkapan baru berdasarkan PSAK 72 mencakup informasi terpilah tentang pendapatan dan informasi tentang kewajiban kinerja yang tersisa pada tanggal pelaporan.

Standar pendapatan baru dapat diterapkan ke semua entitas dan akan menggantikan semua persyaratan pengakuan pendapatan saat ini berdasarkan PSAK. Baik penerapan restropektif penuh atau penerapan restrospektif yang dimodifikasi diperlukan untuk periode tahunan yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2020. Perusahaan telah mengadopsi standar tersebut pada tanggal efektifnya, dengan menggunakan metode adopsi retrospektif yang dimodifikasi. Standar ini tidak berlaku untuk pendapatan atau pendapatan yang terkait dengan instrumen keuangan yang tercakup dalam PSAK 71 seperti piutang dagang dan sekuritas investasi keuangan. Penerapan standar ini tidak memiliki dampak keuangan material terhadap laporan keuangan Perusahaan.

Tanggal 31 Desember 2020 Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

#### 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

#### m. Pengakuan Pendapatan dan Beban (lanjutan)

PSAK 72, "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan" berlaku untuk semua kontrak dengan pelanggan kecuali untuk: sewa dalam ruang lingkup ISAK 8, "Penentuan apakah Suatu Perjanjian Mengandung suatu Sewa"; instrumen keuangan dan hak atau kewajiban kontraktual lainnya dalam lingkup PSAK 71, "Instrumen Keuangan" dan PSAK 15, "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama"; kontrak asuransi dalam lingkup PSAK 62, "Kontrak Asuransi"; dan pertukaran non-moneter antara entitas dalam lini bisnis yang sama untuk memfasilitasi penjualan kepada pelanggan atau calon pelanggan.

Berdasarkan PSAK 72, entitas mengakui pendapatan ketika (atau pada saat) kewajiban pelaksanaan terpenuhi, yaitu ketika pengendalian barang atau jasa yang mendasari kewajiban pelaksanaan tertentu dialihkan ke pelanggan.

Sebelum penerapan PSAK 72, Perusahaan telah mengadopsi PSAK 23.

Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh Perusahaan dan jumlahnya dapat diukur secara handal. Pendapatan diukur pada nilai wajar pembayaran yang diterima, tidak termasuk diskon, rabat, Pajak Hotel dan Restoran (PHR).

#### Pendapatan hotel

Pendapatan hotel terdiri dari pendapatan jasa perhotelan dan penjualan makanan dan minuman, sebagai berikut:

#### - Pendapatan jasa perhotelan

Pendapatan jasa perhotelan yang terdiri dari pendapatan kamar dan departemental lainnya diakui pada saat jasa diberikan.

#### - Penjualan makanan dan minuman

Pendapatan dari penjualan makanan dan minuman diakui bila risiko dan manfaat yang signifikan telah berpindah kepada pembeli.

#### Pendapatan sewa bangunan dan kendaraan

Pendapatan sewa bangunan dan kendaraan diakui sebagai sewa operasi sesuai dengan periode yang sudah berjalan pada tahun yang bersangkutan. Pendapatan yang telah di terima di muka namun belum dapat diakui dalam laba rugi, dicatat sebagai akun "pendapatan diterima di muka", dan diakui sebagai pendapatan secara berkala sesuai dengan kontrak yang berlaku.

#### Pendapatan bunga

Pendapatan bunga merupakan pendapatan yang diperoleh Perusahaan atas penempatan dana di bank yang diakui pada saat diperoleh atau saat terjadinya.

#### Penjualan Barang

Pendapatan dari penjualan yang timbul dari pengiriman fisik produk-produk Perusahaan diakui bila risiko dan manfaat yang signifikan telah berpindah kepada pembeli, yang pada umumnya terjadi pada saat yang bersamaan dengan pengiriman dan penerimaan barang.

#### Beban

Beban usaha dan beban lain-lain diakui pada saat terjadinya (dasar akrual).

Tanggal 31 Desember 2020 Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

#### 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

#### n. Sewa

Perusahaan menerapkan PSAK 73, "Sewa" efektif sejak tanggal 1 Januari 2020.

Perubahan dalam definisi sewa terutama terkait dengan konsep kontrol. PSAK 73 menentukan suatu kontrak mengandung sewa apabila pelanggan memiliki hak untuk mengendalikan penggunaan aset yang diidentifikasi untuk periode waktu tertentu.

PSAK 73 mensyaratkan penyewa untuk mengakui sebagian besar sewa pada neraca. Standar ini mencakup dua pengecualian pengakuan untuk penyewa - sewa aset 'bernilai rendah' dan sewa jangka pendek. Pada tanggal dimulainya sewa, penyewa akan mengakui liabilitas untuk melakukan pembayaran sewa (liabilitas sewa) dan aset yang mewakili hak untuk menggunakan aset pendasar selama masa sewa (aset hak-guna). Penyewa akan diminta untuk secara terpisah mengakui beban bunga atas liabilitas sewa dan biaya penyusutan atas aset hak-guna.

Aset hak-guna awalnya diukur pada biaya perolehan dan kemudian diukur pada biaya perolehan (tunduk pada pengecualian tertentu) dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai, disesuaikan untuk setiap pengukuran kembali liabilitas sewa. Liabilitas sewa awalnya diukur pada nilai kini dari pembayaran sewa yang belum dibayarkan pada tanggal tersebut. Selanjutnya, liabilitas sewa disesuaikan antara lain dengan pembayaran bunga dan sewa, serta dampak modifikasi sewa. Dengan demikian, klasifikasi arus kas juga akan terpengaruh sebagai pembayaran sewa operasi berdasarkan PSAK 30 disajikan sebagai arus kas operasi; sedangkan berdasarkan model PSAK 73, pembayaran sewa akan dibagi menjadi bagian pokok dan bagian bunga yang akan disajikan masing-masing sebagai arus kas pendanaan dan operasi.

Berbeda dengan akuntansi penyewa, PSAK 73 tidak mengubah secara substansial cara pesewa mencatat sewa. Dalam PSAK 73, pesewa tetap mengklasifikasikan sewa sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi dan mencatat kedua jenis sewa tersebut secara berbeda.

Tetapi, PSAK 73 telah mengubah dan memperluas persyaratan pengungkapan, terutama cara pesewa mengelola risiko yang timbul dari kepentingan residual dalam aset sewa.

Perusahaan menerapkan PSAK 73 dengan menggunakan metode retrospektif yang dimodifikasi. Dengan metode ini, standar diterapkan secara retrospektif dengan efek kumulatif dari penerapan standar yang diakui pada tanggal penerapan awal.

Perusahaan memilih untuk menggunakan kebijaksanaan praktis transisi untuk tidak menilai kembali apakah suatu kontrak adalah, atau mengandung sewa pada tanggal 1 Januari 2020. Sebaliknya, Perusahaan menerapkan standar hanya pada kontrak yang sebelumnya diidentifikasi sebagai sewa yang menerapkan PSAK 30 pada tanggal awal perjanjian.

Perusahaan, sebagai penyewa, memiliki sewa yang sebelumnya diklasifikasikan dalam sewa operasi. Liabilitas sewa diukur pada nilai kini dari sisa pembayaran sewa. Aset hak guna diukur pada jumlah yang sama dengan liabilitas sewa, disesuaikan dengan jumlah pembayaran di muka atau pembayaran sewa yang masih harus dibayar sehubungan dengan sewa yang diakui di laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2019.

Dalam menerapkan PSAK 73 untuk pertama kalinya, Perusahaan menerapkan cara praktis berikut yang diizinkan oleh standar:

- menerapkan tingkat diskonto tunggal untuk portofolio sewa dengan karakteristik yang cukup serupa;
- pengakuan liabilitas sewa dan aset hak guna tidak termasuk sewa dengan persyaratan sewa yang berakhir selama tahun keuangan berjalan atau untuk sewa aset bernilai rendah;
- pengecualian biaya langsung awal dari pengukuran aset hak-guna pada tanggal 1 Januari 2020;
- penentuan jangka waktu sewa pada tanggal 1 Januari 2020 dengan menggunakan tinjau balik di mana kontrak berisi opsi untuk memperpanjang atau mengakhiri sewa;
- pemilihan berdasarkan kelas aset pendasar untuk tidak memisahkan komponen nonsewa dari komponen sewa.

Tanggal 31 Desember 2020 Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

#### 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

#### n. Sewa (lanjutan)

Berdasarkan keterangan di atas, per 1 Januari 2020 Aset hak guna sebesar Rp311.111.111 telah diakui dan disajikan sebagai bagian dari "Aset Tetap" pada laporan posisi keuangan;

#### Dari tanggal 1 Januari 2020

#### Sebagai Penyewa

Pada tanggal permulaan kontrak, Perusahaan menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian, Perusahaan harus menilai apakah:

- Perusahaan memiliki hak untuk mendapatkan secara subtansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasian; dan
- Perusahaan memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian. Perusahaan memiliki hak ini ketika Perusahaan memiliki hak untuk pengambilan keputusan yang relevan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya dan:
  - 1. Perusahaan memiliki hak untuk mengoperasikan aset;
  - 2. Perusahaan telah mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode penggunaan.

Pada tanggal permulaan sewa, Perusahaan mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa. Aset hak-guna diukur pada biaya perolehan, dimana meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan dan estimasi biaya yang akan dikeluarkan untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan dan ketentuan sewa, dikurangi dengan insentif sewa yang diterima.

Jika Perusahaan dibebankan kewajiban atas biaya membongkar dan memindahkan aset sewa, merestorasi tempat di mana aset berada atau merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan oleh syarat dan ketentuan sewa, provisi diakui dan diukur sesuai PSAK 57. Biaya tersebut diperhitungkan dalam asset hakguna terkait, kecuali jika biaya tersebut terjadi untuk memproduksi persediaan.

Aset hak penggunaan kemudian diukur dengan biaya lebih sedikit akumulasi penyusutan dan penurunan kerugian. Aset hak penggunaan disusutkan secara garis lurus selama jangka waktu sewa yang lebih pendek dan perkiraan kehidupan aset yang berguna yaitu selama 5 tahun.

Aset hak-guna disusutkan selama periode yang lebih singkat antara masa sewa dan masa manfaat aset pendasar. Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Perusahaan akan mengeksekusi opsi beli, aset hak-guna disusutkan selama masa manfaat aset pendasar. Penyusutan dmulai pada tanggal permulaan sewa.

Selain itu, aset hak penggunaan juga disesuaikan untuk pengukuran kembali tanggung jawab sewa tertentu. Aset hak guna disajikan sebagai bagian dari "Aset Tetap" dalam laporan posisi keuangan.

Perusahaan menerapkan PSAK 48 untuk menentukan apakah aset hak-guna mengalami penurunan nilai dan mencatat kerugian penurunan nilai yang teridentifikasi sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan asset penurunan nilai.

Tanggal 31 Desember 2020 Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

#### 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

#### n. Sewa (lanjutan)

#### Dari tanggal 1 Januari 2020 (lanjutan)

#### Sebagai Penyewa (lanjutan)

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Pada umumnya, Perusahaan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai tingkat bunga diskonto.

Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi pembayaran berikut ini:

- pembayaran tetap, termasuk pembayaran tetap secara substansi dikurangi dengan piutang insentif sewa;
- pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga yang pada awalnya diukur dengan menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan;
- jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa dengan jaminan nilai residual;
- harga eksekusi opsi beli jika Perusahaan cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut; dan
- penalti karena penghentian awal sewa kecuali jika Perusahaan cukup pasti untuk tidak menghentikan lebih awal.

Liabilitas sewa disajikan sebagai pos terpisah dalam laporan posisi keuangan.

Liabilitas sewa selanjutnya diukur dengan meningkatkan jumlah tercatat untuk mereflesikan bunga atas liabilitas sewa (menggunakan metode suku bunga efektif) dan dengan mengurangi jumlah tercatat untuk merefleksikan sewa yang telah dibayar.

Pembayaran sewa dialokasikan menjadi bagian pokok dan biaya keuangan. Biaya keuangan dibebankan pada laba rugi selama periode sewa sehingga menghasilkan tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas untuk setiap periode.

(i) Sewa jangka-pendek dan sewa yang aset pendasarnya bernilai-rendah

Perusahaan memutuskan untuk tidak mengakui asset hak-guna dan liabilitas sewa untuk sewa jangka pendek yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang dan sewa yang aset pendasarnya bernilai-rendah. Perusahaan mengakui pembayaran sewa atas sewa tersebut sebagai beban operasi dengan dasar garis lurus selama masa sewa, kecuali dasar sistematis lainnya lebih merepresentasikan pola konsumsi manfaat penyewa dari aset sewa.

#### (ii) Modifikasi sewa

Perusahaan mencatat modifikasi sewa sebagai sewa terpisah jika:

- modifikasi meningkatkan ruang lingkup sewa dengan menambahkan hak untuk menggunakan satu aset pendasar atau lebih; dan
- imbalan sewa meningkat sebesar jumlah yang setara dengan harga tersendiri untuk peningkatan dalam ruang lingkup dan penyesuaian yang tepat pada harga tersendiri tersebut untuk merefleksikan kondisi kontrak tertentu.

Tanggal 31 Desember 2020 Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

#### 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

#### n. Sewa (lanjutan)

#### Dari tanggal 1 Januari 2020 (lanjutan)

#### Sebagai Penyewa (lanjutan)

(ii) Modifikasi sewa (lanjutan)

Untuk modifikasi sewa yang tidak dicatat sebagai sewa terpisah, pada tanggal efektif modifikasi sewa, Perusahaan:

- mengukur kembali dan mengalokasikan imbalan kontrak modifikasian;
- menentukan masa sewa dari sewa modifikasian;
- mengukur kembali liabilitas sewa dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian berdasarkan sisa umur sewa dan sisa pembayaran sewa dengan melakukan penyesuaian terhadap aset hak-guna. Tingkat diskonto revisian ditentukan sebagai suku bunga pinjaman inkremental Perusahaan pada tanggal efektif modifikasi;
- menurunkan jumlah tercatat aset hak-guna untuk merefleksikan penghentian sebagian atau sepenuhnya sewa untuk modifikasi sewa yang menurunkan ruang lingkup sewa. Perusahaan mengakui dalam laba rugi setiap laba rugi yang terkait dengan penghentian sebagian atau sepenuhnya sewa tersebut; dan
- membuat penyesuaian terkait dengan aset hak-guna untuk seluruh modifikasi sewa lainnya.

Sewa variabel yang tidak bergantung pada indeks atau suku bunga tidak diperhitungkan dalam pengukuran liabilitas sewa dan asset hak-guna. Pembayaran terkait diakui sebagai beban dalam periode di mana peristiwa atau kondisi yang memicu pembayaran tersebut terjadi dan dicatat dalam pos "Beban umum dan administrasi" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Sebagai cara praktis, PSAK 73 mengijinkan penyewa untuk memisahkan komponen nonsewa, dan mencatat masing-masing komponen sewa dan komponen nonsewa sebagai kesepakatan sewa tunggal. Perusahaan tidak menggunakan cara praktis ini. Untuk kontrak yang memiliki komponen sewa dan satu atau lebih sewa tambahan atau komponen non sewa, Perusahaan mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke setiap komponen sewa dengan dasar harga jual relatif berdiri sendiri dari komponen sewa dan jumlah agregat masing-masing dari komponen non sewa.

#### Sebagai Pesewa

Sewa di mana Perusahaan sebagai pesewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi. Ketika persyaratan sewa secara substansial mengalihkan seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan ke penyewa, kontrak tersebut diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Seluruh sewa lainnya diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

Ketika Perusahaan adalah pesewa-antara, Perusahaan mencatat sewa utama dan subsewa sebagai dua kontrak yang terpisah. Subsewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi dengan mengacu pada aset hak-guna yang timbul dari sewa utama.

Penghasilan sewa dari sewa operasi diakui secara garis lurus selama masa sewa yang relevan. Biaya langsung awal yang terjadi dalam menegosiasikan dan mengatur sewa operasi ditambahkan ke jumlah tercatat asset sewa dan diakui secara garis lurus selama masa sewa.

Dalam sewa pembiayaan, jumlah terutang oleh penyewa diakui sebagai piutang sebesar jumlah yang sama dengan investasi sewa neto Perusahaan. Pengakuan penghasilan sewa pembiayaan dialokasikan pada periode akuntansi yang mencerminkan suatu tingkat pengembalian periodik yang konstan atas investasi bersih pesewa.

Ketika suatu kontrak mencakup komponen sewa dan non-sewa, Perusahaan menerapkan PSAK 72 untuk mengalokasikan imbalan berdasarkan kontrak bagi setiap komponen.

Tanggal 31 Desember 2020 Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

#### 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

#### n. Sewa (lanjutan)

#### Sebelum tanggal 1 Januari 2020

Perusahaan mengklasifikasikan sewa berdasarkan sejauh mana risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset sewa pembiayaan berada pada *lessor* atau *lessee*, dan pada substansi transaksi dari pada bentuk kontraknya.

#### Sewa Operasi - sebagai Lessee

Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tidak mengalihkan secara substantif seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Dengan demikian, pembayaran sewa diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus (straight-line basis) selama masa sewa.

#### Sewa Operasi - sebagai Lessor

Aset disewakan melalui sewa operasi, aset disajikan di laporan posisi keuangan sesuai sifat aset tersebut. Penghasilan sewa diakui sebagai pendapatan dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

#### o. Pajak Penghasilan

#### Pajak final

Peraturan perpajakan di Indonesia mengatur beberapa jenis penghasilan dikenakan pajak yang bersifat final. Pajak final yang dikenakan atas nilai bruto transaksi tetap dikenakan walaupun atas transaksi tersebut pelaku transaksi mengalami kerugian.

Mengacu pada revisi PSAK No. 46 (Revisi 2014), pajak final tersebut tidak termasuk dalam lingkup yang diatur oleh PSAK No. 46. Oleh karena itu, Perusahaan memutuskan untuk menyajikan pajak final sehubungan dengan aktivitas *real estate* dan sewa di dalam akun beban usaha - beban umum dan administrasi.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 5 tanggal 23 Maret Tahun 2002, pajak penghasilan untuk pendapatan sewa ruang perkantoran dan pusat ritel dikenakan pajak bersifat final sebesar 10% dari nilai pendapatan yang besangkutan.

Berdasarkan peraturan Pemerintah No. 34/2016 tanggal 8 Agustus 2016 dan Peraturan Menteri Keuangan No.261/PMK.03/2016, penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan dikenakan pajak bersifat final sebesar 2,5%.

#### Pajak penghasilan tidak final

Beban pajak merupakan pajak tidak final, yang terdiri dari pajak kini dan tangguhan. Beban pajak diakui dalam laba rugi kecuali untuk transaksi yang berhubungan dengan transaksi diakui langsung ke ekuitas, dalam hal ini diakui sebagai penghasilan komprehensif lainnya.

#### Pajak kini

Beban pajak kini dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku pada tanggal pelaporan keuangan, dan ditetapkan berdasarkan taksiran laba kena pajak tahun berjalan. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sehubungan dengan situasi dimana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.

Tanggal 31 Desember 2020 Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

#### 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

#### o. Pajak Penghasilan (lanjutan)

#### Pajak kini (lanjutan)

Kekurangan atau kelebihan pembayaran pajak penghasilan badan dicatat sebagai bagian dari beban pajak kini dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima. Jika Perusahaan mengajukan keberatan, Perusahaan mempertimbangkan apakah besar kemungkinan otoritas pajak akan menerima keberatan tersebut dan merefleksikan dampaknya terhadap liabilitas perpajakan Perusahaan.

#### Pajak tangguhan

Pajak tangguhan diukur dengan metode liabilitas atas beda waktu pada tanggal pelaporan antara dasar pengenaan pajak untuk aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya untuk tujuan pelaporan keuangan. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dengan beberapa pengecualian. Aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan rugi fiskal apabila terdapat kemungkinan besar bahwa jumlah laba kena pajak pada masa mendatang akan memadai untuk mengkompensasi perbedaan temporer dan rugi fiskal.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer dari aset dan liabilitas antara pelaporan komersial dan pajak pada setiap tanggal laporan. Manfaat pajak masa mendatang, seperti rugi fiskal yang dapat dikompensasi, diakui sepanjang besar kemungkinan manfaat pajak tersebut dapat direalisasikan.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan dikaji ulang pada akhir periode pelaporan, dan mengurangi jumlah tercatat jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasi sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan yang belum diakui dinilai kembali pada setiap akhir periode pelaporan dan diakui sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak mendatang akan memungkinkan aset pajak tangguhan tersedia untuk dipulihkan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dihitung berdasarkan tarif yang akan dikenakan pada periode saat aset direalisasikan atau liabilitas tersebut diselesaikan, berdasarkan undang-undang pajak yang berlaku atau berlaku secara substantif pada akhir periode laporan keuangan. Pengaruh pajak terkait dengan penyisihan dan/atau pemulihan semua perbedaan temporer selama tahun berjalan, termasuk pengaruh perubahan tarif pajak, dikreditkan atau dibebankan pada periode operasi berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas (defisiensi ekuitas).

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan secara saling hapus saat hak yang dapat dipaksakan secara hukum ada untuk saling hapus aset pajak kini dan liabilitas pajak kini, atau aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan berkaitan dengan entitas kena pajak yang sama, atau Perusahaan bermaksud untuk menyelesaikan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto.

#### p. Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak

PSAK 70 memberikan pilihan kebijakan dalam pengakuan awal aset atau liabilitas yang timbul dari pelaksanaan undang-undang pengampunan pajak, yaitu dengan mengikuti SAK yang relevan menurut sifat aset atau liabilitas yang diakui (PSAK 70 Par. 06) atau mengikuti ketentuan yang diatur dalam paragraf 10 hingga 23 PSAK 70 (Pendekatan Opsional). Keputusan yang dibuat oleh Perusahaan harus konsisten untuk semua aset dan liabilitas pengampunan pajak yang diakui.

Aset pengampunan pajak diakui sebesar biaya perolehan berdasarkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak (SKPP). Liabilitas pengampunan pajak diakui sebesar kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau setara kas untuk menyelesaikan kewajiban yang berkaitan langsung dengan perolehan aset pengampunan pajak.

Tanggal 31 Desember 2020 Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

#### 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

#### p. Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak (lanjutan)

Perusahaan mengakui selisih antara aset pengampunan pajak dan liabilitas pengampunan pajak sebagai bagian dari tambahan modal disetor di ekuitas. Selisih tersebut tidak dapat diakui sebagai laba rugi direalisasi maupun direklasifikasi ke saldo laba.

Perusahaan mengakui uang tebusan yang dibayarkan dalam laba rugi pada periode diterimanya Surat Keterangan Pengampunan Pajak.

Perusahaan menyesuaikan saldo klaim, aset pajak tangguhan, dan provisi pajak dalam laba rugi pada periode diterimanya Surat Keterangan Pengampunan Pajak.

Perusahaan telah memilih untuk mengukur kembali aset dan liabilitas pengampunan pajak berdasarkan nilai wajar sesuai dengan SAK pada tanggal Surat Keterangan Pengampunan Pajak. Selisih pengukuran kembali antara nilai wajar tersebut dengan biaya perolehan yang telah diakui sebelumnya, disesuaikan dalam saldo tambahan modal disetor.

Setelah Perusahaan melakukan pengukuran kembali aset dan liabilitas pengampunan pajak ke nilai wajar sesuai SAK, Perusahaan mereklasifikasi aset dan liabilitas pengampunan pajak tersebut ke dalam pos aset dan liabilitas serupa.

#### q. Informasi Segmen

Segmen operasi diidentifikasi berdasarkan laporan internal mengenai komponen dari Perusahaan yang secara regular direview oleh "pengambil keputusan operasional" dalam rangka mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

- i. yang terlibat dalam aktivitas bisnis untuk memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- ii. yang hasil operasinya dikaji ulang secara regular oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- iii. dimana tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Informasi yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam rangka alokasi sumber daya dan penillaian kinerja mereka terfokus pada kategori dari setiap produk.

Pendapatan, beban, hasil, aset dan liabilitas segmen termasuk hal-hal yang dapat diatribusikan secara langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang memadai untuk segmen tersebut.

#### r. Laba Per Saham

Laba per saham dihitung dengan membagi total laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik Perusahaan dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

#### s. Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan

Peristiwa setelah akhir periode yang memerlukan penyesuaian dan menyediakan informasi Perusahaan pada tanggal pelaporan tercermin dalam laporan keuangan.

Peristiwa setelah akhir periode yang tidak memerlukan penyesuaian diungkapkan dalam laporan keuangan apabila material.

Tanggal 31 Desember 2020 Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

#### 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

## t. Standar, Amendemen/ Penyesuaian dan Interpretasi Standar yang Berlaku Efektif pada Tahun Berjalan

Dalam tahun berjalan, Perusahaan telah menerapkan standar dan sejumlah amendemen/ penyesuaian/ interpretasi PSAK yang relevan dengan operasinya dan efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020.

Amandemen PSAK 71, "Instrumen Keuangan: Fitur Percepetan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif"

Amendemen PSAK 71 mengamendemen paragraf PP4.1.11(b) dan PP4.1.12(b), dan menambahkan paragraf PP4.1.12A sehingga mengatur bahwa aset keuangan dengan fitur percepatan pelunasan yang dapat menghasilkan skompensasi negatif memenuhi kualifikasi sebagai arus kas kontraktual yang berasal semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

- Amandemen PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan: Definisi Material" dan Amandemen PSAK 25, "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan: Definisi Material"

Definisi yang baru menyatakan bahwa "Informasi adalah material jika menghilangkan, salah saji atau mengaburkannya yang diyakini dapat diharapkan untuk mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh pengguna utama laporan keuangan tujuan umum yang dibuat berdasarkan laporan keuangan tersebut, yang menyediakan informasi keuangan tentang entitas pelaporan tertentu".

Amandemen tersebut mengklarifikasi bahwa materialitas akan tergantung pada sifat atau besarnya informasi. Sebuah entitas perlu menilai apakah informasi tersebut, baik secara individu atau kombinasi dengan informasi lain, adalah material dalam konteks laporan keuangan. Salah saji informasi adalah material jika diyakini dapat diharapkan untuk mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh pengguna utama.

 ISAK 36, "Interaksi antara Ketentuan mengenai Hak atas Tanah dalam PSAK 16, Aset Tetap, dan PSAK 73. Sewa"

Secara umum, ISAK 36 mengatur mengenai:

- a. Penilaian dalam menentukan perlakuan akuntansi terkait suatu hak atas tanah yang melihat pada substansi dari hak atas tanah dan bukan bentuk legalnya;
- Perlakuan akuntansi terkait hak atas tanah yang sesuai dengan PSAK 16 yaitu jika suatu ketentuan kontraktual memberikan hak yang secara substansi menyerupai pembelian aset tetap, termasuk ketentuan dalam PSAK 16 paragraf 58 yang mengatur bahwa pada umumnya tanah tidak disusutkan;
- c. Perlakuan akuntansi terkait hak atas tanah yang sesuai dengan PSAK 73 yaitu jika substansi suatu hak atas tanah tidak mengalihkan pengendalian atas aset pendasar dan hanya memberikan hak untuk menggunakan aset pendasar tersebut selama suatu jangka waktu, maka substansi hak atas tanah tersebut adalah transaksi sewa.

Penerapan dari interpretasi dan penyesuaian-penyesuaian tersebut diatas tidak memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangan.

Tanggal 31 Desember 2020 Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

#### 3. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN ESTIMASI

Penyusunan laporan keuangan Perusahaan mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi, dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dan pengungkapan yang terkait, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat pada aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

#### Pertimbangan

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan, manajemen telah membuat keputusan berikut, yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

#### Klasifikasi Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Perusahaan menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan bila definisi yang ditetapkan PSAK 71 (mulai 1 Januari 2020) dan PSAK 55 (sebelum 1 Januari 2020) dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi seperti yang diungkapkan pada Catatan 2c.

#### Penilaian Model Bisnis

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan bergantung pada hasil SPPI dan uji model bisnis. Perusahaan menentukan model bisnis pada tingkat yang mencerminkan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola bersama untuk mencapai tujuan bisnis tertentu. Penilaian ini mencakup penilaian yang mencerminkan semua bukti yang relevan termasuk bagaimana kinerja aset dievaluasi dan kinerjanya diukur, risiko yang memengaruhi kinerja aset dan bagaimana hal ini dikelola dan bagaimana manajer aset diberi kompensasi. Perusahaan memantau aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain yang dihentikan pengakuannya sebelum jatuh tempo untuk memahami alasan pelepasannya dan apakah alasan tersebut konsisten dengan tujuan bisnis di mana aset tersebut dimiliki. Pemantauan adalah bagian dari penilaian berkelanjutan Perusahaan atas apakah model bisnis di mana aset keuangan yang tersisa dimiliki tetap sesuai dan jika tidak sesuai apakah telah terjadi perubahan dalam model bisnis dan dengan demikian terdapat perubahan prospektif terhadap klasifikasi aset keuangan tersebut. Tidak ada perubahan yang diperlukan selama periode yang disajikan.

#### Penentuan Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional Perusahaan adalah mata uang dari lingkungan ekonomi primer dimana Perusahaan beroperasi. Mata uang tersebut adalah mata uang yang mempengaruhi pendapatan dan beban dari jasa yang diberikan. Berdasarkan penilaian manajemen Perusahaan, mata uang fungsional adalah Rupiah.

#### Komitmen Sewa Operasi - Sebagai Lessor

Perusahaan telah mengadakan perjanjian sewa properti investasi. Perusahaan telah menentukan, berdasarkan evaluasi dari persyaratan dan kondisi perjanjian, bahwa Perusahaan mempertahankan semua risiko dan manfaat signifikan dari kepemilikan properti ini dan mengakui kontrak tersebut sebagai sewa operasi.

#### Kelangsungan Usaha

Manajemen Perusahaan telah melakukan penilaian terhadap kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usaha dan menilai keyakinan bahwa Perusahaan memiliki sumber daya untuk melanjutkan bisnis di masa mendatang. Selain itu, manajemen Perusahaan menilai tidak adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan signifikan terhadap kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Oleh karena itu, laporan keuangan dilanjutkan untuk disusun atas basis kelangsungan usaha. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 30.

Tanggal 31 Desember 2020 Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

# 3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI, DAN ASUMSI (lanjutan)

#### Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama masa depan dan ketidakpastian sumber estimasi utama yang lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini. Perusahaan mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

#### Penilaian Instrumen Keuangan

Perusahaan mencatat aset dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajar, yang mengharuskan penggunaan estimasi akuntansi. Sementara komponen signifikan atas pengukuran nilai wajar ditentukan menggunakan bukti obyektif yang dapat diverifikasi, jumlah perubahan nilai wajar dapat berbeda bila Perusahaan menggunakan metodologi penilaian yang berbeda. Perubahan nilai wajar aset dan liabilitas keuangan tersebut dapat mempengaruhi secara langsung laba atau rugi Perusahaan. Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan diungkapkan pada Catatan 2c dan 26.

#### Penyusutan Aset Tetap

Biaya perolehan aset tetap, kecuali tanah, disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 1 tahun sampai dengan 20 tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri dimana Perusahaan menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan dapat direvisi. Penjelasan lebih lanjut diungkapkan dalam Catatan 2h dan 9.

# Provisi Ekspektasi Kerugian Kredit Piutang Usaha

Saat mengukur ECL, Perusahaan menggunakan informasi masa depan yang wajar dan dapat didukung, yang didasarkan pada asumsi untuk pergerakan masa depan dari berbagai pendorong ekonomi dan bagaimana penggerak ini akan saling mempengaruhi.

Loss given default adalah estimasi kerugian yang timbul karena gagal bayar. Perhitungan didasarkan pada perbedaan antara arus kas kontraktual terutang dan yang diharapkan akan diterima, dengan mempertimbangkan arus kas dari agunan dan peningkatan kredit integral.

*Probability of default* merupakan input utama dalam mengukur ECL. Probability of default adalah perkiraan kemungkinan gagal bayar selama jangka waktu tertentu, yang penghitungannya mencakup data historis, asumsi, dan ekspektasi kondisi masa depan.

Nilai tercatat piutang usaha Perusahaan sebelum penyisihan kerugian kredit ekspektasian pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing diungkapkan dalam Catatan 5.

# Penyisihan Penurunan Nilai Pasar dan Keusangan Persediaan

Penyisihan penurunan nilai pasar dan keusangan persediaan diestimasi berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas kepada, kondisi fisik persediaan yang dimiliki, harga jual pasar, estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang timbul untuk penjualan. Provisi dievaluasi kembali dan disesuaikan jika terdapat tambahan informasi yang mempengaruhi jumlah yang diestimasi.

Tanggal 31 Desember 2020 Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

# 3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI, DAN ASUMSI (lanjutan)

#### Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

#### Penyusutan Properti Investasi

Biaya perolehan properti investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis properti investasi 20 tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri dimana Perusahaan menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan dapat direvisi. Penjelasan lebih lanjut diungkapkan dalam Catatan 2i dan 10.

#### Penurunan Nilai Aset Nonkeuangan

Penurunan nilai muncul saat nilai tercatat aset atau Unit Penghasil Kas (UPK) melebihi nilai terpulihkannya, yang lebih besar antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakainya. Nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual didasarkan pada ketersediaan data dari perjanjian penjualan yang mengikat yang dibuat dalam transaksi normal atas aset serupa atau harga pasar yang dapat diamati dikurangi dengan biaya tambahan yang dapat diatribusikan dengan pelepasan aset. Perhitungan nilai pakai didasarkan pada model arus kas yang didiskontokan. Data arus kas diambil dari anggaran untuk lima tahun yang akan datang dan tidak termasuk aktivitas restrukturisasi yang belum dilakukan oleh Perusahaan atau investasi signifikan dimasa datang yang akan memutakhirkan kinerja aset dari UPK yang diuji. Nilai terpulihkan paling dipengaruhi oleh tingkat diskonto yang digunakan dalam model arus kas yang didiskontokan, sebagaimana juga jumlah arus kas masuk di masa datang yang diharapkan dan tingkat pertumbuhan yang digunakan untuk tujuan ekstrapolasi.

#### Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan

Penentuan utang dan liabilitas imbalan kerja Perusahaan bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, umur pensiun, dan tingkat mortalitas. Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang ditetapkan Perusahaan diakui segera pada laporan posisi keuangan dengan debit atau kredit ke saldo laba melalui penghasilan komprehensif lainnya dalam periode terjadinya. Sementara Perusahaan berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Perusahaan dapat mempengaruhi secara material liabilitas diestimasi atas pensiun dan imbalan kerja dan beban imbalan kerja neto. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 2l dan 17.

#### Pajak Penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti dalam kegiatan usaha normal. Perusahaan mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

#### Aset Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer antara nilai tercatat aset pada laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak jika besar kemungkinan bahwa jumlah laba fiskal akan memadai untuk pemanfaatan perbedaan temporer yang diakui. Estimasi manajemen yang signifikan diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang diakui berdasarkan kemungkinan waktu terealisasinya dan jumlah laba kena pajak pada masa mendatang serta strategi perencanaan pajak masa depan.

Tanggal 31 Desember 2020 Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

#### 4. KAS DAN SETARA KAS

Kas dan setara kas terdiri dari:

	2020	2019
Kas	17.159.565	13.897.698
Bank Pihak ketiga		
PT Bank KEB Hana Indonesia	1.454.748.907	1.071.518.928
PT Bank Central Asia Tbk	755.995.193	832.879.771
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	19.752.710	48.889.856
Subtotal Bank	2.230.496.810	1.953.288.555
Deposito Pital handari		_
Pihak berelasi PT BPR Kredit Mandiri Indonesia (Catatan 8a)	23.000.000.000	_
1 1 Di 1 Nodi Mandii indonesia (Catatan da)		
Total Kas dan Setara Kas	25.247.656.375	1.967.186.253

Seluruh saldo kas dan setara kas Perusahaan dalam mata uang Rupiah.

Kisaran suku bunga deposito berjangka pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar 12,5%.

# 5. PIUTANG USAHA

Rincian piutang usaha berdasarkan jenis piutang adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Pihak ketiga		
Lembaga Pendidikan Primagama	66.000.000	-
Guest Ledger	28.800.620	138.521.881
City ledger	28.773.474	144.635.677
Electronic data capture	8.958.999	8.696.000
Total pihak ketiga	132.533.093	291.853.558
Pihak berelasi (Catatan 8b)	210.000.000	-
Total	342.533.093	291.853.558
		-

Rincian piutang usaha berdasarkan umur piutang adalah sebagai berikut:

	2020	2019
0 - 30 hari 31 - 60 hari	59.657.293 6.875.800	232.446.708 53.700.000
61 - 90 hari Lebih dari 90 hari	276.000.000	5.706.850 -
Total	342.533.093	291.853.558

Guest Ledger merupakan piutang usaha dari pelanggan hotel selama masih menginap di hotel. Piutang ini akan dilunasi pelanggan atau direklasifikasi ke *city ledger* pada saat pelanggan yang telah memiliki fasilitas kredit dari Perusahaan *check out* dari hotel.

City Ledger merupakan piutang usaha dari pelanggan yang telah memiliki fasilitas kredit dari Perusahaan dan sudah tidak menginap di hotel.

*Electronic Data Capture* merupakan piutang usaha dari pelanggan hotel yang menggunakan sistem pembayaran menggunakan kartu kredit sehingga terdapat jangka waktu pencairan.

Tanggal 31 Desember 2020 Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

# 5. PIUTANG USAHA (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, semua piutang usaha Perusahaan merupakan piutang dalam mata uang Rupiah.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan piutang masing-masing pelanggan pada akhir tahun, manajemen Perusahaan berkeyakinan tidak perlu dibentuk cadangan penurunan nilai piutang.

#### 6. PERSEDIAAN

Persediaan terdiri atas:

	2020	2019
Printing & stationery	28.798.954	26.759.663
Guest supplies	9.721.914	13.930.907
Promotion material	5.232.998	-
Food	5.110.767	14.067.824
Engineering supplies	2.406.244	1.975.964
Paint	1.864.688	-
Cleaning supplies	1.706.900	2.922.233
Spare part	390.350	275.200
Beverage	167.500	639.500
Miscellaneous	9.458.430	8.042.681
Total persediaan	64.858.745	68.613.972

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan persediaan pada akhir tahun, manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada penyisihan penurunan nilai persediaan dan persediaan usang untuk menutup kemungkinan kerugian atas persediaan.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Perusahaan tidak mengasuransikan persediaannya.

# 7. BEBAN DIBAYAR DI MUKA

Beban dibayar di muka terdiri atas:

	2020	2019
Jangka pendek		
Asuransi	17.331.062	9.988.709
Sewa	-	88.888.908
License	-	8.333.334
Reklame	25.337.100	-
Lain-lain	10.056.608	3.073.299
Subtotal jangka pendek	52.724.770	110.284.250
Jangka panjang - Sewa	<del>-</del>	311.111.094
Total	52.724.770	421.395.344

Beban dibayar di muka - sewa merupakan sewa atas ruang perkantoran kepada pihak berelasi (Catatan 8c).

#### 8. SIFAT, TRANSAKSI, DAN SALDO PIHAK-PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan usahanya, Perusahaan melakukan transaksi berdasarkan harga dan persyaratan yang disepakati bersama dengan pihak-pihak berelasi. Piutang dari atau utang kepada pihak-pihak berelasi tidak dibebani bunga dan tidak memiliki jadwal pelunasan kembali yang tetap.

Hubungan dan sifat transaksi dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

#### Tanggal 31 Desember 2020 Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

# 8. SIFAT, TRANSAKSI, DAN SALDO PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

No	Pihak-pihak Berelasi	Sifat Hubungan	Sifat Transaksi
1	PT Esta Prima Investama	Manajemen yang sama	Aset hak guna sewa
2	PT Smart Multi Finance	Manajemen yang sama	Pendapatan diterima di muka dan pendapatan sewa
3	PT BPR Kredit Mandiri Indonesia	Manajemen yang sama	Deposito, pendapatan diterima di muka dan pendapatan sewa
4	PT Esta Dana Ventura	Manajemen yang sama	Piutang usaha, pendapatan diterima di muka dan pendapatan sewa
5	PT Esta Kapital Fintek	Manajemen yang sama	Pendapatan sewa

Rincian saldo yang timbul dari transaksi dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

#### a. Deposito

Pada tanggal 31 Desember 2020, Perusahaan menempatkan deposito kepada PT BPR Kredit Mandiri Indonesia sebesar Rp23.000.000.000 atau 31.00% dari total Aset.

#### b. Piutang usaha

Akun ini merupakan piutang yang dimiliki Perusahaan dari PT Esta Dana Ventura atas sewa ruang perkantoran pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp210.000.000 atau 0,28% dari total aset.

#### c. Beban dibayar di muka

Akun ini merupakan beban dibayar di muka yang dimiliki Perusahaan atas sewa ruang perkantoran kepada PT Esta Prima Investama pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp400.000.000 atau 0,77% dari total aset.

# d. Pendapatan diterima di muka

lauralia Dandali	2020		2019	
Jangka Pendek	Total	% <sup>*)</sup>	Total	% <sup>*)</sup>
PT Esta Dana Ventura	314.444.444	2,02	255.370.370	1,55
PT BPR Kredit Mandiri Indonesia	165.000.000	1,06	237.222.222	1,44
PT Smart Multi Finance	155.092.593	1,00	161.111.111	0,98
	634.537.037	4,08	653.703.703	3,97

<sup>\*)</sup> persentase terhadap total liabilitas.

langka Panjang	2020		2019	
Jangka Panjang	Total	% <sup>*)</sup>	Total	%*)
PT Smart Multi Finance	260.185.185	1,67	4.166.667	0,03
PT Esta Dana Ventura	137.500.000	0,88	7.407.407	0,04
PT BPR Kredit Mandiri Indonesia	77.777.778	0,50	344.629.630	2,09
	475.462.963	3,05	356.203.704	2,16

<sup>\*)</sup> persentase terhadap total liabilitas.

PT Esta Dana Ventura menyewa ruko kepada Perusahaan di 3 lokasi berbeda, yaitu Karawang, Serpong dan Gorontalo. Jangka waktu masa sewa ruko yang berada di Karawang terhitung mulai tanggal 28 Februari 2016 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021 dengan harga sewa sebesar Rp222.222.222 selama 5 tahun. Jangka waktu masa sewa ruko yang berada di Serpong terhitung mulai tanggal 1 Februari 2017 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022 dengan harga sewa sebesar Rp111.111.111 yang dibayarkan setiap tahunnya. Jangka waktu masa sewa ruko yang berada di Gorontalo terhitung mulai tanggal 1 Desember 2018 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023 yang dibayarkan setiap tahunnya dengan rincian sebagai berikut:

- Tanggal 1 Desember 2018 sampai dengan tanggal 1 Desember 2019 sebesar Rp 200.000.000;
- Tanggal 1 Desember 2019 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020 sebesar Rp 220.000.000;
- Tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021 sebesar Rp 240.000.000;
- Tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022 sebesar Rp 260.000.000;
- Tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023 sebesar Rp 280.000.000;

Tanggal 31 Desember 2020 Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

# 8. SIFAT, TRANSAKSI, DAN SALDO PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

#### d. Pendapatan diterima di muka (lanjutan)

PT BPR Kredit Mandiri menyewa ruko kepada Perusahaan di 3 lokasi berbeda, yaitu di Cikarang, Karawang dan Bandung. Jangka waktu masa sewa ruko yang berlokasi di Cikarang terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021, sedangkan ruko yang berlokasi di Karawang dan Bandung terhitung mulai tanggal 1 November 2016 sampai dengan tanggal 1 November 2019. Harga sewa masing-masing lokasi tersebut sebesar Rp216.666.666, Rp200.000.000 dan Rp266.666.666 selama 3 tahun.

PT BPR Kredit Mandiri memperpanjang masa sewa ruko kepada Perusahaan yang berlokasi di Karawang dan Bandung. Jangka waktu sewa ruko tersebut terhitung mulai tanggal 1 November 2019 sampai dengan tanggal 1 November 2022 dengan harga sewa masing-masing sebesar Rp225.000.000 dan Rp270.000.000 selama 3 tahun.

PT Smart Multi Finance menyewa ruko kepada Perusahaan di 2 lokasi berbeda, yaitu Tangerang Selatan dan Makassar. Ruko yang berada di Tangerang Selatan disewakan selama 5 tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021 sebesar Rp555.555.555. Ruko yang berada di Makassar disewakan selama 5 tahun terhitung mulai tanggal 1 Februari 2016 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021 sebesar Rp250.000.000.

PT Smart Multi Finance memperpanjang masa sewa ruko yang berada di Tangerang Selatan dan Makassar. Jangka waktu sewa ruko yang berada di Tangerang Selatan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024 dengan harga sewa sebesar Rp300.000.000. Jangka waktu sewa ruko yang berada di Makassar terhitung mulai tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023 dengan harga sewa sebesar Rp111.111.111.

#### e. Pendapatan sewa

#### Akun ini terdiri dari:

Dandanatan Causa Dulea	2020		2019	
Pendapatan Sewa Ruko	Total	% <sup>*)</sup>	Total	%* <sup>)</sup>
PT Esta Dana Ventura	455.000.000	5,17	335.000.000	4,10
PT BPR Kredit Mandiri	279.351.852	3,17	229.351.852	2,81
PT Smart Multi Finance	161.111.111	1,83	161.111.111	1,97
	895.462.963	10,17	725.462.963	8,88

#### \*) Persentase terhadap total pendapatan.

Bandanatan Sawa Kandaraan	2020	2020		2019	
Pendapatan Sewa Kendaraan	Total	% <sup>*)</sup>	Total	% <sup>*)</sup>	
PT Esta Dana Ventura	2.551.100.000	28,98	369.000.000	4,52	
PT BPR Kredit Mandiri	418.000.000	4,75	128.000.000	1,57	
PT Esta Kapital Fintek	44.000.000	0,50	-	=	
	3.013.100.000	34,23	497.000.000	6,09	

<sup>\*)</sup> Persentase terhadap total pendapatan.

Tanggal 31 Desember 2020 Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

#### 9. ASET TETAP

Rincian dan mutasi aset tetap Perusahaan adalah sebagai berikut:

21	Desem	hor	202	n
31	Desem	ner	7017	

			31 Desem	Der 2020		
	31 Desember 2019	Penerapan PSAK 73	1 Januari 2020	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2020
Harga perolehan						
Kepemilikan langsung						
Tanah	2.968.000.000	-	2.968.000.000	-	-	2.968.000.000
Bangunan	21.706.043.278	-	21.706.043.278	-	-	21.706.043.278
Kendaraan	147.950.000	-	147.950.000	-	-	147.950.000
Perlengkapan	2.051.008.375	-	2.051.008.375	1.600.000	-	2.052.608.375
Perabotan	482.935.209	-	482.935.209	-	-	482.935.209
Utang pembiayaan konsumen						
Kendaraan	4.948.036.324	-	4.948.036.324	2.974.797.572	-	7.922.833.896
Aset hak guna sewa						
Bangunan	<u> </u>	444.444.444	444.444.444		<u>-</u>	444.444.444
Total harga perolehan	32.303.973.186	444.444.444	32.748.417.630	2.976.397.572	<u> </u>	35.724.815.202
Aset dalam pembangunan						
Bangunan	155.000.000	-	155.000.000	15.000.000	-	170.000.000
Akumulasi Penyusutan						
Kepemilikan langsung						
Bangunan	1.886.162.123	-	1.886.162.123	1.085.302.163	-	2.971.464.286
Kendaraan	200.503.655	-	200.503.655	954.001.177	-	1.154.504.832
Perlengkapan	716.355.553	-	716.355.553	414.126.113	-	1.130.481.666
Perabotan	481.649.640	-	481.649.640	1.285.572	-	482.935.212
Aset hak guna sewa						
Bangunan	<del></del>	44.444.444	44.444.444	88.888.889	<u> </u>	133.333.333
Total akumulasi penyusutan	3.284.670.971	44.444.444	3.329.115.415	2.543.603.914	<u> </u>	5.872.719.329
Nilai buku	29.174.302.215					30.022.095.873

Tanggal 31 Desember 2020 Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

# 9. ASET TETAP (lanjutan)

	31 Desember 2019			
	31 Desember 2018	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2019
<u>Harga perolehan</u>				
Kepemilikan langsung				
Tanah	2.968.000.000	-	-	2.968.000.000
Bangunan	21.636.043.278	70.000.000	-	21.706.043.278
Kendaraan	147.950.000	-	-	147.950.000
Perlengkapan	2.028.648.375	22.360.000	-	2.051.008.375
Perabotan	475.221.769	7.713.440	-	482.935.209
Utang pembiayaan konsumen				
Kendaraan	<u>-</u>	4.948.036.324		4.948.036.324
Total harga perolehan	27.255.863.422	5.048.109.764		32.303.973.186
Aset dalam pembangunan				
Bangunan	155.000.000	-	-	155.000.000
Akumulasi Penyusutan				
Kepemilikan langsung				
Bangunan	804.068.292	1.082.093.831	-	1.886.162.123
Kendaraan	22.192.497	178.311.158	-	200.503.655
Perlengkapan	304.350.754	412.004.799	-	716.355.553
Perabotan	349.467.328	132.182.312		481.649.640
Total akumulasi penyusutan	1.480.078.871	1.804.592.100		3.284.670.971
Nilai buku	25.930.784.551			29.174.302.215

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Perusahaan masing-masing memiliki 39 dan 27 kendaraan yang bertujuan untuk disewakan. Jumlah kendaraan yang telah disewakan masing-masing adalah sebanyak 38 dan 22 kendaraan (Catatan 20).

Kepemilikan aset tanah adalah berupa Hak Guna Bangunan yang seluruhnya atas nama Perusahaan yang memiliki masa manfaat antara 14 sampai 30 tahun yang berlaku sampai dengan antara tahun 2028 sampai 2044. Manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa tidak akan terdapat kesulitan dalam memperpanjang hak atas tanah, karena aset tersebut diperoleh secara sah dan dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah.

Penyusutan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 dialokasikan dalam:

	2020	2019
Beban pokok pendapatan (Catatan 21) Beban usaha - beban umum	924.411.181	145.242.392
dan administrasi (Catatan 22a)	1.619.192.733	1.659.349.708
Saldo Akhir Tahun	2.543.603.914	1.804.592.100

Sebagian tanah dan bangunan Perusahaan digunakan sebagai jaminan atas utang bank jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 (Catatan 15).

Tanggal 31 Desember 2020 Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

# 9. ASET TETAP (lanjutan)

Tingkat penyelesaian dan estimasi penyelesaian aset dalam pembangunan adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Persentase Penyelesaian Hotel 88 Gorontalo	0,1%	0,1%
<u>Tahun Penyelesaian</u> Hotel 88 Gorontalo	-	Desember 2022

Aset dalam pembangunan - Hotel 88 Gorontalo belum bisa ditentukan tahun penyelesaiannya karena pembangunan sedang dihentikan akibat pandemi Covid-19.

Aset tetap berupa bangunan dan sebagian kendaraan, telah diasuransikan oleh Perusahaan kepada PT Asoka Mas, PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia dan PT Asuransi Raksa Pratikara untuk risiko kebakaran dan risiko lainnya, dengan nilai pertanggungan sebesar Rp22.168.205.000 dan Rp26.474.936.324 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut telah memadai untuk menutupi kemungkinan terjadinya kerugian terhadap risiko kerugian yang mungkin terjadi atas aset tetap bangunan dan kendaraan.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat indikasi penurunan nilai atas aset tetap, sehingga tidak diperlukan cadangan kerugian penurunan nilai untuk aset tetap.

#### 10. PROPERTI INVESTASI

Rincian dan mutasi properti investasi Perusahaan adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2020			
	31 Desember 2019	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2020
Harga perolehan				
Tanah	6.249.224.869	-	92.988.000	6.156.236.869
Bangunan	16.026.932.235	-	564.300.238	15.462.631.997
Perlengkapan	=	459.490.624		459.490.624
Total harga perolehan	22.276.157.104	459.490.624	657.288.238	22.078.359.490
Akumulasi penyusutan				
Bangunan	2.929.905.472	798.995.361	239.827.601	3.489.073.232
Perlengkapan	<u> </u>	105.299.935	<u> </u>	105.299.935
Total akumulasi penyusutan	2.929.905.472	904.295.296	239.827.601	3.594.373.167
Penurunan nilai				
Tanah	147.710.000	-	-	147.710.000
Nilai Buku	19.198.541.632			18.336.276.323
Nilai Buku	19.190.341.032			16.530.270.323
		31 Desen	nber 2019	
	31 Desember 2018	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2019
Harga perolehan				
Tanah	10.358.924.869	-	4.109.700.000	6.249.224.869
Bangunan	16.026.932.235			16.026.932.235
Total harga perolehan	26.385.857.104		4.109.700.000	22.276.157.104
Akumulasi penyusutan				
Bangunan	2.128.558.860	801.346.612	=	2.929.905.472
G				
<u>Penurunan nilai</u>				
Tanah	<del>-</del>	147.710.000	<del>-</del>	147.710.000
Nilai Buku	24.257.298.244			19.198.541.632

Tanggal 31 Desember 2020 Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

# 10. PROPERTI INVESTASI (lanjutan)

Beban penyusutan properti investasi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp904.295.295 dan Rp801.346.612 disajikan dalam akun "Penyusutan Properti Investasi" sebagai bagian dari "Beban Pokok Pendapatan" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain (Catatan 21).

Rincian dari laba penjualan properti investasi adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Harga perolehan	417.460.637	4.109.700.000
Penerimaan dari penjualan properti investasi	1.251.851.852	7.500.000.000
Laba penjualan properti investasi	834.391.215	3.390.300.000

Tanah dan bangunan Perusahaan digunakan sebagai jaminan atas utang bank jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 (Catatan 15).

Properti investasi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2020 terdiri dari 13 ruko, 1 unit apartemen, 1 gedung perkantoran dan 4 bidang tanah kosong.

Pada tanggal 31 Desember 2020, jumlah properti investasi yang telah disewakan sebanyak 11 ruko, 1 unit apartemen dan 1 gedung perkantoran, dengan nilai pendapatan sewa yang diakui untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing masing sebesar Rp1.468.862.976 dan Rp972.918.506 (Catatan 20).

Properti investasi berupa bangunan, telah diasuransikan oleh Perusahaan kepada PT Asuransi Etiqa Internasional dan PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya, dengan nilai pertanggungan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp11.350.000.000 dan Rp7.250.000.000.

Perusahaan mengakui penurunan nilai atas properti investasi berupa tanah yang terletak di jalan Trans Sulawesi, Dusun IV, Desa Mongkoinit, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongodow, Provinsi Sulawesi Utara sebesar Rp147.710.000 yang dicatat pada "Penghasilan (beban) lain-lain" untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Selain properti investasi berupa tanah tersebut, manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat indikasi penurunan nilai atas properti investasi yang lain.

#### 11. UTANG USAHA

Rincian utang usaha berdasarkan nama pemasok adalah sebagai berikut:

2020	2019
43.157.710	45.105.454
19.224.000	17.859.000
4.934.000	10.719.500
2.483.000	14.887.950
2.160.000	11.096.000
-	10.299.000
34.856.383	41.367.380
106.815.093	151.334.284
	19.224.000 4.934.000 2.483.000 2.160.000

Tanggal 31 Desember 2020 Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

# 11. UTANG USAHA (lanjutan)

Rincian utang usaha berdasarkan umur utang adalah sebagai berikut:

	2020	2019
1 - 30 hari	56.624.521	102.884.384
31 - 60 hari	22.134.100	48.449.900
61 - 91 hari	6.323.490	-
Lebih dari 90 hari	21.732.982	-
Total	106.815.093	151.334.284

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, semua utang usaha Perusahaan merupakan utang dalam mata uang Rupiah.

# 12. BEBAN AKRUAL

Rincian beban akrual adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Service charge	252.098.553	203.300.244
Audit fee	70.000.000	-
Prasarana	54.851.640	31.350.000
Gaji dan upah	14.884.476	49.982.714
Lain-lain	86.125.858	63.546.722
Total	477.960.527	348.179.680

Beban akrual - service charge adalah service charge yang diperoleh dari pelanggan atas jasa perhotelan.

# 13. PERPAJAKAN

# a. Pajak dibayar di muka

Akun ini terdiri dari:

	2020	2019
Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 Pasal 21	118.499.999 2.745.689	146.330.744
Total	121.245.688	146.330.744

# b. Utang Pajak

Akun ini terdiri dari:

71.101.010
74.424.349
-
891.440 1.387.275
76.703.064

Tanggal 31 Desember 2020 Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

# 13. PERPAJAKAN (lanjutan)

# c. Pajak kini (lanjutan)

Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan rugi fiskal untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Laba sebelum beban pajak Perusahaan	1.694.706.292	1.945.354.692
Beda waktu		
Imbalan kerja karyawan	175.174.764	87.667.758
Penyusutan hak guna sewa	88.888.889	-
Penyusutan aset tetap	(110.227.150)	20.669.605
Beda tetap		
Beban untuk memperoleh pendapatan		
yang dikenakan pajak final	2.536.659.269	1.767.394.116
Beban pajak final	347.251.586	295.331.848
Pendapatan keuangan yang dikenakan		
pajak final	(1.943.855.537)	(3.478.359)
Pendapatan yang telah dikenakan		
pajak final	(1.468.862.976)	(972.918.506)
Laba atas penjualan properti investasi	(834.391.215)	(3.390.300.000)
Rugi penurunan nilai properti investasi	-	147.710.000
Laba (rugi) fiskal tahun berjalan	485.343.922	(102.568.846)
Rugi fiskal tahun sebelumnya	(3.018.869.860)	(2.916.301.014)
Akumulasi rugi fiskal	(2.533.525.938)	(3.018.869.860)
	<del></del>	

Rugi fiskal tahun 2020 dan 2019 hasil rekonsiliasi di atas menjadi dasar dalam pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan Perusahaan.

Rekonsiliasi antara manfaat pajak penghasilan yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku dari laba sebelum manfaat pajak penghasilan seperti yang dilaporkan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Laba sebelum beban pajak penghasilan	1.694.706.292	1.945.354.692
Pajak dihitung dengan tarif pajak yang berlaku	372.835.384	486.338.673
Aset pajak tangguhan yang tidak diakui	(106.775.663)	25.642.211
Pengaruh pajak atas beda tetap	(299.903.752)	(539.065.225)
Penyesuaian tarif pajak	9.104.579	<u>-</u>
Total manfaat pajak penghasilan	(24.739.452)	(27.084.341)

Tanggal 31 Desember 2020 Serta Untuk Tahun

Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

# 13. PERPAJAKAN (lanjutan)

# d. Pajak tangguhan

Imbalan kerja karyawan

Total

4.442.868

71.696.956

Perhitungan manfaat (beban) pajak tangguhan atas beda temporer antara pelaporan komersial dan pajak dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

(22.909.808)

(22.909.808)

3.450.000

75.871.489

			31 Desemb	er 2020		
	Saldo Awal	Efek penerapan PSAK 73	Dikreditkan pada Laporan Laba Rugi	Penyesuaian tarif	Dibebankan pada Penghasilan Komprehensif Lain	Saldo Akhir
Penyusutan aset tetap	72.421.489	-	(24.249.973)	(8.690.579)		39.480.937
Sewa	-	(88.000.000)	19.555.556	-	-	(68.444.444)
Imbalan kerja karyawan	3.450.000		38.538.448	(414.000)	(9.674.232)	31.900.216
Total	75.871.489	(88.000.000)	33.844.031	(9.104.579)	(9.674.232)	2.936.709
		31 Dese	ember 2019			
	Saldo Awal	Dikreditkan pada Laporan Laba Rugi	Dibebankan pada Penghasilan Komprehensif Lain	Saldo Akhir		
Penyusutan aset tetap	67.254.088	5.167.401	<del></del>	72.421.489		

Manajemen memutuskan untuk tidak mengakui aset pajak tangguhan yang berasal dari akumulasi rugi fiskal karena realisasi atas aset tersebut tidak dapat dipastikan.

21.916.940

27.084.341

Tanggal 31 Desember 2020 Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

#### 13. PERPAJAKAN (lanjutan)

#### e. Pajak final

Perhitungan beban pajak final menggunakan tarif pajak final yang berlaku untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Pendapatan sewa bangunan yang dikenakan pajak final	1.468.862.976	972.918.506
Pajak final (10%)	145.386.298	97.291.850

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, terdapat perbedaan pengakuan antara pendapatan sewa dan beban pajak. Hal ini disebabkan Lembaga Pendidikan Primagama yang tidak memotong pajak final karena tidak mempunyai NPWP, sehingga Perusahaan yang menyetor langsung utang pph 4 ayat 2 tersebut.

#### f. Pengampunan pajak

Berdasarkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak ("SKPP") tanggal 28 September 2016, Perusahaan mengungkapkan kepemilikan aset sebesar Rp500.000.000 berupa uang tunai. Perusahaan mengakui aset pengampunan pajak tersebut sebagai bagian dari kas dan bank dan tambahan modal disetor.

Uang tebusan yang dibayar berdasarkan SKPP sebesar Rp10.000.000; dibebankan pada laba rugi periode tahun 2016.

# g. Perubahan tarif pajak badan

Pada tanggal 31 Maret 2020, sebagai bagian dari stimulus ekonomi untuk perlindungan dampak Covid-19, pemerintah Republik Indonesia mengumumkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ("Perpu") No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Perpu No.1 Tahun 2020 mengatur, antara lain, penurunan tarif pajak badan sebagai berikut:

- Untuk tahun pajak 2020 dan 2021: dari 25% menjadi 22%;
- Mulai tahun pajak 2022: dari 22% menjadi 20%;
- Perusahaan terbuka dalam negeri yang memenuhi kriteria tambahan tertentu dapat memperoleh tarif pajak sebesar 3% lebih rendah dari tarif pajak yang disebutkan di atas.

# 14. PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA

Rincian pendapatan diterima di muka adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Jangka Pendek:		
Pihak ketiga		
PT Indomarco Prismatama	75.000.000	87.500.000
Lembaga Pendidikan Primagama	30.000.000	15.000.000
Uang muka pelanggan	8.451.309	19.152.204
Badan Pembinaan Ideologi	-	350.900.000
Pihak berelasi (Catatan 8d)	634.537.037	653.703.703
Subtotal Jangka Pendek	747.988.346	1.126.255.907

Tanggal 31 Desember 2020 Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

# 14. PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA (lanjutan)

	2020	2019
<u>Jangka Panjang:</u> Pihak ketiga Lembaga Pendidikan Primagama Pihak berelasi (Catatan 8d)	15.000.000 475.462.963	356.203.704
Subtotal Jangka Panjang	490.462.963	356.203.704
Total	1.238.451.309	1.482.459.611

Akun ini merupakan uang muka yang diterima terlebih dahulu dengan masa sewa berkisar selama 1 - 5 tahun masa sewa atas jasa sewa properti investasi yang dimiliki Perusahaan.

#### 15. UTANG BANK JANGKA PANJANG

Akun ini merupakan utang bank Perusahaan yang diperoleh dari PT Bank KEB Hana Indonesia, dengan rincian sebagai berikut:

	2020	2019
Pokok pinjaman: PT Bank KEB Hana Indonesia		
Kredit Investasi I	5.651.930.218	6.588.977.453
Kredit Investasi II	5.260.299.160	5.957.770.897
Total pinjaman	10.912.229.378	12.546.748.350
Dikurangi biaya provisi yang belum diamortisasi	(144.382.260)	(190.971.532)
Neto pinjaman	10.767.847.118	12.355.776.818
Dikurangi bagian yang jatuh tempo: dalam waktu satu tahun: Kredit Investasi I	1.051.612.134	930.299.207
Kredit Investasi II	783.520.665	691.420.290
Dikurangi biaya provisi yang belum diamortisasi	(43.429.393)	(46.589.272)
Neto bagian jangka pendek	1.791.703.406	1.575.130.225
Neto bagian jangka panjang	8.976.143.712	10.780.646.593

# Kredit Investasi I

Berdasarkan perjanjian kredit No. 27/132/C2/Kredit/15 pada tanggal 15 Mei 2015, Perusahaan memperoleh Kredit Investasi dengan batas maksimal kredit sebesar Rp15.000.000.000 dan bersifat "*Non-Revolving*". Jangka waktu pinjaman selama 120 bulan sejak tanggal pencairan fasilitas. Fasilitas tersebut dibebani tingkat suku bunga tahunan sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) per tahun (*floating rate*).

Sebagian saldo Kredit Investasi I telah dilunasi lebih cepat sebesar Rp5.000.000.000 pada tanggal 20 Juli 2016.

Fasilitas Kredit Investasi I, dilunasi secara angsuran bulanan dengan nilai angsuran sebesar Rp136.667.514 setiap bulannya, sejak tanggal 20 November 2018 sampai dengan tanggal 20 Mei 2025.

Berdasarkan Perubahan ke 10 (sepuluh) dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit Nomor 029/I/M/2020 pada tanggal 20 Mei 2020, pihak Bank merubah tingkat suku bunga Fasilitas Kredit Investasi I yang sebelumnya sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) menjadi 11% (sebelas persen) per tahun (*floating rate*).

Tanggal 31 Desember 2020 Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

# 15. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)

#### Kredit Investasi I (lanjutan)

Setelah adanya perubahan tingkat suku bunga, Perusahaan melunasi angsuran bulanan dengan nilai angsuran sebesar Rp135.112.806 setiap bulannya terhitung mulai tanggal 20 Juni 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2025.

#### Kredit Investasi II

Berdasarkan perjanjian kredit No. 28/058/C2/Kredit/16 pada tanggal 14 Maret 2016, Perusahaan memperoleh Kredit Investasi dengan batas maksimal kredit sebesar Rp22.000.000.000 (dua puluh dua milyar rupiah) dengan jangka waktu pinjaman 10 (sepuluh) tahun dengan *grace period* 18 (delapan belas) bulan sejak pencairan kredit pertama. Pencairan pinjaman tersebut diangsur 3 kali pencairan yaitu:

- Pencairan pertama sebesar Rp7.000.000.000 (tujuh milyar rupiah), yang dibagi penerimaannya pada tanggal 20 September 2016 sebesar Rp2.000.000.000 dan pada tanggal 6 Juli 2017 sebesar Rp5.000.000.000.
- 2. Pencairan kedua sebesar Rp7.000.000.000 (tujuh milyar rupiah) yang telah diterima pada tanggal 20 Oktober 2017.
- 3. Pencairan ketiga sebesar Rp8.000.000.000 (delapan milyar rupiah) yang dibagi penerimaannya pada tanggal 6 Desember 2017 sebesar Rp5.000.000.000 dan pada tanggal 23 Januari 2018 sebesar Rp3.000.000.000.

Berdasarkan Perubahan ke 10 (sepuluh) dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit Nomor 029/I/M/2020 pada tanggal 20 Mei 2020, pihak Bank merubah tingkat suku bunga Fasilitas Kredit Investasi II yang sebelumnya sebesar 11-11,5% menjadi 11% (sebelas persen) per tahun (*floating rate*).

Setelah adanya perubahan tingkat suku bunga, Perusahaan melunasi angsuran bulanan dengan nilai angsuran sebesar Rp 110.285.992 setiap bulannya terhitung mulai tanggal 20 Juni 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2026.

Perjanjian Kredit Investasi I dan II telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir kali berdasarkan Perubahan ke 10 (sepuluh) dan Pernyataan Kembali Perjanjian kredit Nomor 029/I/M/2020 pada tanggal 20 Mei 2020 mengenai perubahan jaminan, sebagai berikut:

- Sebidang tanah dan bangunan (Hotel 88) yang terletak di Jl. Cut Meutia RT 1 RW 2 Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Bekasi, Jawa Barat, dengan bukti kepemilikan SHGB No. 4973/Sepanjang Jaya seluas 841m² atas nama Perusahaan;
- 2. Ruko yang terletak di Ruko BSD Junction Blok A No. 11, Lengkong Wetan, Serpong, Tangerang, Banten dengan bukti kepemilikan SHMASRS No. 0117/Lengkong Wetan atas nama Perusahaan;
- 3. Dua (2) unit ruko yang terletak di JI Raya Perumnas Bumi Teluk Jambe, Desa Sukaluyu, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Karawang, Jawa Barat dengan bukti kepemilikan SHGB No. 02065 dan No. 02067/Sukaluyu atas nama Perusahaan;
- Dua (2) unit ruko yang terletak di JI Raya Perumnas Bumi Teluk Jambe, Desa Sukaluyu, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Karawang, Jawa Barat dengan bukti kepemilikan SHGB No. 02064 dan No. 02066/Sukaluyu atas nama Perusahaan;
- 5. Ruko yang terletak di Jalan Terusan Kopo No 341 D, RT 004, RW 004 (Blok Cilokotot) Kelurahan Margahayu Selatan, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat dengan bukti Kepemilikan SHGB Nomor 4544/Margahayu Selatan (d/h SHM 5229/Margahayu Selatan) terdaftar atas nama Perusahaan;

Selama Perusahaan memperoleh fasilitas kredit-kredit di atas, Perusahaan dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Melakukan perubahan anggaran dasar, penurunan modal, dan perubahan pemegang saham tanpa persetujuan terlebih dahulu dari bank.
- 2. Membayar dividen atau melakukan distribusi atas pendapatan lainnya kepada pemegang saham.
- 3. Menjual, menyewakan, mengalihkan atau dengan cara lain menghapus semua atau sebagian besar dari hak milik atau hartanya, apakah melalui satu transaksi atau beberapa transaksi baik berhubungan atau tidak.
- 4. Membeli atau dengan cara lain mendapatkan semua atau jumlah yang substansial aset atau saham perusahaan lain.
- 5. Mengubah bentuk bangunan atau konstruksi Jaminan.

Tanggal 31 Desember 2020 Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

# 15. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)

Selama Perusahaan memperoleh fasilitas kredit-kredit di atas, Perusahaan dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut: (lanjutan)

- 6. Membebani lagi Jaminan dengan Hak Tanggungan, atau dengan sesuatu jenis pembebanan lain apapun juga untuk keuntungan sesuatu pihak kecuali Bank.
- 7. Menyewakan atau mengizinkan penempatan atau penggunaan maupun menguasakan Jaminan kepada pihak lain

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Perusahaan telah memenuhi semua ketentuan yang dipersyaratkan oleh PT Bank KEB Hana Indonesia.

#### 16. UTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Perusahaan mengadakan perjanjian pembiayaan konsumen dengan PT BCA Finance untuk pembelian kendaraan. Rincian utang pembiayaan konsumen adalah sebagai berikut:

2020	2019
3.044.625.800	2.374.439.900
(366.763.496)	(383.921.686)
2.677.862.304	1.990.518.214
1.262.383.289	629.342.727
1.415.479.015	1.361.175.487
	3.044.625.800 (366.763.496) 2.677.862.304 1.262.383.289

Utang pembiayaan konsumen ini dikenai tingkat suku bunga sebesar 12,60% per tahun dengan menggunakan metode anuitas atau setara dengan bunga flat sebesar 6,45% per tahun dan akan dilunasi selama tiga tahun melalui angsuran bulanan.

Beban bunga atas utang pembiayaan konsumen tersebut masing-masing sebesar sebesar Rp354.695.689 dan Rp26.921.630 untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

# 17. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN

Perusahaan memberikan imbalan kerja jangka panjang kepada karyawan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 (UU No. 13/2003). Imbalan tersebut tidak didanai. Tabel berikut menyajikan komponen dari beban imbalan neto yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan jumlah yang diakui dalam laporan posisi keuangan untuk liabilitas imbalan kerja yang dihitung oleh PT Sigma Prima Solusindo, aktuaris independen, berdasarkan laporannya masing-masing tertanggal 10 Maret 2021 dan 30 Januari 2020 untuk perhitungan liabilitas imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019. Perhitungan aktuaris menggunakan metode "*Projected Unit Credit*" dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Tingkat diskonto	7,00%	7,64%
Tingkat kenaikan gaji tahunan	10,00%	10,00%
Usia pensiun	56 Tahun	55 Tahun
Tingkat mortalita	TMI-IV tahun 2019	TMI-III tahun 2011
Metode penilaian	Projected Unit	Projected Unit
	Credit	Credit

Liabilitas imbalan kerja karyawan yang diakui dalam laporan posisi keuangan terdiri atas:

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Nilai kini liabilitas imbalan kerja	145.000.980	13.800.000

Tanggal 31 Desember 2020 Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

# 17. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan)

Beban imbalan kerja karyawan yang diakui dalam laba-rugi adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Beban jasa kini Beban bunga	174.120.444 1.054.320	86.102.091 1.565.667
Beban imbalan kerja (Catatan 22a)	175.174.764	87.667.758

Rincian beban imbalan kerja karyawan yang diakui pada ekuitas dalam penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Keuntungan aktuarial yang timbul dari: Perubahan asumsi keuangan	(43.973.784)	(91.639.231)
Total penghasilan imbalan kerja yang diakui pada penghasilan komprehensif lain	(43.973.784)	(91.639.231)

Mutasi liabilitas imbalan kerja karyawan yang diakui pada laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Saldo awal tahun	13.800.000	17.771.473
Beban imbalan kerja tahun berjalan (Catatan 22a)	175.174.764	87.667.758
Penghasilan komprehensif lain	(43.973.784)	(91.639.231)
Saldo akhir tahun	145.000.980	13.800.000

Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah liabilitas imbalan kerja cukup untuk memenuhi persyaratan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

#### Analisa sensitivitas untuk risiko tingkat diskonto

Pada tanggal 31 Desember 2020, jika tingkat diskonto meningkat sebesar 1% dengan semua variabel konstan, maka nilai kini liabilitas imbalan pasti menjadi lebih rendah yaitu sebesar Rp127.349.420, sedangkan jika tingkat diskonto menurun 1%, maka nilai kini liabilitas imbalan pasti menjadi lebih besar yaitu sebesar Rp166.279.279.

Jika tingkat kenaikan gaji meningkat sebesar 1% dengan semua variabel konstan, maka nilai kini liabilitas imbalan pasti menjadi lebih besar yaitu sebesar Rp164.957.610, sedangkan jika tingkat kenaikan gaji menurun 1%, maka nilai kini liabilitas imbalan pasti menjadi lebih rendah yaitu sebesar Rp128.063.930.

Manajemen Perusahaan telah mereviu asumsi yang digunakan dan berpendapat bahwa asumsi tersebut sudah memadai. Manajemen berkeyakinan bahwa liabilitas imbalan kerja tersebut telah memadai untuk menutupi liabilitas imbalan kerja Perusahaan.

Jatuh tempo dari kewajiban imbalan kerja yang tidak didiskonto pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

31 Desember 2020
28.291.235 - 116.709.745
145.000.980

Rata-rata durasi kewajiban imbalan pasti adalah 19 tahun.

Tanggal 31 Desember 2020 Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

# 18. MODAL SAHAM

Berdasarkan Akta Notaris Maichel Vecky Katuuk, S.H. M.Kn., No. 13 tanggal 30 Agustus 2019, Perusahaan melakukan penjualan atas modal saham dari pemegang saham yaitu PT Esta Prima Investama dengan kepemilikan saham sebanyak 42.950 lembar saham atau sebesar Rp42.950.000.000 dengan tingkat persentase kepemilikan sebesar 99,88% kepada PT Esta Utama Corpora sebesar Rp42.950.000.000 dan dari pemegang saham Yeti Sopandi dengan kepemilikan saham sebanyak 50 lembar saham atau sebesar Rp50.000.000 dengan tingkat persentase kepemilikan sebesar 0,12% kepada PT Bartley Sejahtera Investama sebesar Rp50.000.000.

Berdasarkan Akta Notaris Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., No. 47 pada tanggal 18 September 2019, seluruh pemegang saham telah menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan mengenai perubahan nama Perusahaan dari PT Esta Multi Usaha menjadi PT Esta Multi Usaha Tbk dan penyesuaian-penyesuaian untuk menyetujui pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham dan memenuhi persyaratan sebagai Perusahaan Terbuka. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. AHU-0073384.AH.01.02.Tahun 2019. Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, maka seluruh pemegang saham menyetujui perubahan nilai lembar per saham dari Rp1.000.000 menjadi Rp100 per lembar saham.

Sehingga susunan pemegang saham dan persentase kepemilikannya pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

#### 31 Desember 2019

Pemegang Saham	Total Saham Ditempatkan dan Disetor penuh	Persentase Pemilikan	Total	
PT Esta Utama Corpora PT Bartley Sejahtera Investama	429.500.000 500.000	99,88% 0,12%	42.950.000.000 50.000.000	
Total	430.000.000	100,00%	43.000.000.000	

Berdasarkan Akta Notaris Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., No. 68 tanggal 30 Maret 2020, seluruh pemegang saham menyatakan bahwa realisasi pelaksanaan atau penerbitan saham IPO (Initial Public Offering) telah selesai dilaksanakan dan menyetujui untuk mengeluarkan saham baru melalui Penawaran Umum kepada masyarakat sebesar 200.000.000 lembar saham baru dengan nilai nominal Rp100.

Sehingga susunan pemegang saham dan persentase kepemilikannya pada tanggal 31 Desember 2020 berdasarkan laporan yang dikelola oleh PT Bima Registra, Biro Administrasi Efek adalah sebagai berikut :

#### 31 Desember 2020

Pemegang Saham	Total Saham Ditempatkan dan Disetor penuh	Persentase Pemilikan	Total
PT Esta Utama Corpora	429.500.000	68,17%	42.950.000.000
Masyarakat	200.000.000	31,75%	20.000.000.000
PT Bartley Sejahtera Investama	500.000	0,08%	50.000.000
Total	630.000.000	100,00%	63.000.000.000

#### 19. TAMBAHAN MODAL DISETOR

Tambahan modal disetor merupakan agio saham yang berasal dari aset pengampunan pajak dan penawaran umum perdana setelah dikurangi dengan beban emisi saham, dengan rincian sebagai berikut:

# Tanggal 31 Desember 2020 Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

# 19. TAMBAHAN MODAL DISETOR (lanjutan)

	31 Desember 2020
Agio saham dari penawaran umum perdana	4.000.000.000
Dikurangi: Beban emisi saham	(2.758.750.962)
Subtotal (Catatan 1b)	1.241.249.038
Aset pengampunan pajak (Catatan 13f)	500.000.000
Total	1.741.249.038

#### 20. PENDAPATAN

Akun ini terdiri dari:

	2020	2019
Pendapatan hotel	4.319.633.175	6.277.051.298
Pendapatan sewa kendaraan	3.013.100.000	497.000.000
Pendapatan sewa bangunan (Catatan 10)	1.468.862.976	972.918.506
Penjualan barang	-	420.000.000
Total	8.801.596.151	8.166.969.804

Pendapatan sewa bangunan merupakan pendapatan yang diperoleh dari sewa properti investasi (Catatan 10) yang dimiliki Perusahaan sebagai berikut:

- 1. 1 unit bangunan ruko yang terletak di ruko BSD Junction Blok A37, Jl. Pahlawan Seribu, BSD City, Tangerang Selatan.
- 2. 1 unit bangunan ruko yang terletak di ruko BSD Junction Blok A11, JI Pahlawan Seribu, BSD City, Tangerang Selatan.
- 3. 1 unit bangunan ruko yang terletak di Jl. Terusan Kopo No. 341D. Bandung.
- 4. 1 unit bangunan ruko yang terletak di Jl. Raya Wangun 240G, Bogor.
- 5. 1 unit bangunan ruko yang terletak di Jl. Raya Wangun 240F, Bogor.
- 6. 1 unit bangunan ruko yang terletak di Plaza Sudirman Center, Blok A12, Jl. Raya Sudirman, Desa Pucung, Kota Baru Karawang, Jawa Barat.
- 7. 4 unit bangunan ruko yang terletak di Jl. Batara No. 135, Bumi Teluk Jambe, Karawang.
- 8. 1 unit bangunan ruko yang terletak di Jl. Bau Mangga No. 16, Masale, Panakukan, Makassar.
- 9. 1 unit bangunan kantor yang terletak di Jl. Drs. Achmad Nadjamuddin, Limba U Dua, Gorontalo.
- 10.1 unit apartemen yang terletak di JI Kasablanka Raya, Kav 88, Jakarta Selatan

Tidak ada transaksi pendapatan kepada satu pelanggan dengan total kumulatifnya di atas 10% dari total pendapatan untuk tahun-tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, pendapatan sewa bangunan kepada pihak-pihak berelasi masing-masing sebesar Rp895.462.962 dan Rp725.462.963 (Catatan 8e).

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, pendapatan sewa kendaraan seluruhnya merupakan pendapatan yang berasal dari pihak berelasi sebesar Rp3.013.100.000 dan Rp497.000.000 (Catatan 8e).

Tanggal 31 Desember 2020 Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

# 21. BEBAN POKOK PENDAPATAN

Rincian beban pokok pendapatan berdasarkan jenis beban adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Beban pokok pendapatan hotel		
Gaji	461.950.133	733.051.797
Perlengkapan ruangan	279.679.950	576.093.197
Jasa manajemen (Catatan 28)	167.343.061	221.642.578
Laundry	131.842.803	145.421.737
Ruangan	110.816.326	284.505.982
Housekeeping	54.858.624	88.283.069
Lain-lain (di bawah Rp 50.000.000)	115.536.683	159.594.871
Beban pokok pendapatan sewa kendaraan		
Penyusutan kendaraan (Catatan 9)	924.411.181	145.242.392
Beban pokok pendapatan sewa bangunan		
Penyusutan properti investasi (Catatan 10)	904.295.295	801.346.612
Beban pokok penjualan barang		
Persediaan siap dijual	-	210.000.000
Total	3.150.734.056	3.365.182.235

Tidak ada transaksi pembelian kepada satu pemasok dengan total kumulatifnya di atas 10% dari total pembelian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

# 22. BEBAN USAHA

Akun ini terdiri dari:

a. Beban umum dan administrasi

terdiri dari:

	2020	2019
Penyusutan aset tetap (Catatan 9)	1.619.192.733	1.659.349.708
Gaji dan tunjangan	1.379.612.828	1.007.049.958
Pajak	385.396.674	333.314.948
Imbalan kerja karyawan (Catatan 17)	175.174.764	87.667.758
Legal	150.788.400	145.227.116
Tenaga ahli	136.000.000	63.810.000
Asuransi	105.099.322	48.137.022
Kantor	45.865.771	57.204.934
Maintenance	42.263.474	40.065.000
Listrik, air, dan telepon	41.914.000	54.409.361
Karyawan	4.114.920	1.350.000
Perjalanan	2.779.475	5.733.311
Sewa	-	44.444.442
Lainnya (di bawah Rp 1 juta)	90.626.010	98.482.645
Total	4.178.828.371	3.646.246.203

b. Beban peralatan, pemeliharaan, dan energi

terdiri dari:

	2020	2019
Listrik dan air	384.525.288	452.487.783
Perbaikan dan pemeliharaan	64.911.972	48.015.800
Bahan bakar	22.189.228	31.303.907
Lainnya (di bawah Rp 3 juta)	60.738.068	81.075.766
Total	532.364.556	612.883.256

# Tanggal 31 Desember 2020 Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

# 22. BEBAN USAHA (lanjutan)

c. Beban r	pemasaran
------------	-----------

	2020	2019
Iklan dan promosi	63.496.540	20.457.101
Perjalanan	462.153	20.228.453
Lainnya (di bawah Rp 1 juta)	<u> </u>	24.063.540
Total	63.958.693	64.749.094

# 23. LABA PER SAHAM

	2020	2019
Laba bersih tahun berjalan Rata-rata tertimbang jumlah saham beredar	1.719.445.744 592.739.726	1.972.439.033 430.000.000
Laba per saham	2,90	4,59

# 24. INFORMASI SEGMEN

Perusahaan mengelompokkan dan mengevaluasi usahanya secara bisnis usahanya.

Tabel berikut ini menyajikan informasi mengenai hasil operasi, aset dan liabilitas dari segmen operasi Perusahaan:

	31 Desember 2020				
<u> </u>	Hotel 88 (Bekasi)	Properti investasi	Sewa kendaraan	Total	
Pendapatan departemental	4.319.633.175	1.468.862.976	3.013.100.000	8.801.596.151	
Beban departemental	1.322.027.580	904.295.295	924.411.181	3.150.734.056	
Laba kotor	2.997.605.595	564.567.681	2.088.688.819	5.650.862.095	
Beban usaha	3.089.692.329	909.805.058	775.654.233	4.775.151.620	
Laba (rugi) usaha	(92.086.734)	(345.237.377)	1.313.034.586	875.710.475	
Pendapatan (beban) lainnya	(16.389.978)	834.391.215	(354.695.689)	463.305.548	
Laba (rugi) sebelum beban yang tidak dapat diatribusikan	(108.476.712)	489.153.838	958.338.897	1.339.016.023	
Beban yang tidak dapat diatribusikan			_	355.690.269	
Laba sebelum beban pajak tangguhan				1.694.706.292	
Manfaat pajak tangguhan			<u>-</u>	24.739.452	
Laba tahun berjalan			_	1.719.445.744	
Penghasilan komprehensif lain yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi pada periode selanjutnya				34.299.552	
Laba komprehensif			_	1.753.745.296	
Aset					
Aset segmen	23.256.609.520	20.597.222.995	6.849.701.553	50.703.534.068	
Aset tidak dapat dialokasi	=			23.486.793.508	
Total aset	23.256.609.520	20.597.222.995	6.849.701.553	74.190.327.576	
Liabilitas					
Liabilitas segmen	720.621.635	1.236.840.000	2.677.862.304	4.635.323.939	
Liabilitas tidak dapat dialokasi	<u>-</u>			10.912.848.098	
Total liabilitas	720.621.635	1.236.840.000	2.677.862.304	15.548.172.037	

Tanggal 31 Desember 2020 Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

# 24. INFORMASI SEGMEN (lanjutan)

_			31 Desember 2019		
_	Hotel 88 (Bekasi)	Properti investasi	Sewa kendaraan	Penjualan barang	Total
Pendapatan departemental	6.277.051.298	972.918.506	497.000.000	420.000.000	8.166.969.804
Beban departemental	2.208.593.231	801.346.612	145.242.392	210.000.000	3.365.182.235
Laba kotor	4.068.458.067	171.571.894	351.757.608	210.000.000	4.801.787.569
Beban usaha	3.437.604.817	666.909.269	118.892.192	100.472.275	4.323.878.553
Laba (rugi) usaha	630.853.250	(495.337.375)	232.865.416	109.527.725	477.909.016
Pendapatan (beban) lainnya	(5.170.295)	3.242.590.000	(26.921.630)		3.210.498.075
Laba sebelum beban yang tidak dapat diatribusikan	625.682.955	2.747.252.625	205.943.786	109.527.725	3.688.407.091
Beban yang tidak dapat diatribusikan					(1.743.052.399)
Laba sebelum beban pajak tangguhan					1.945.354.692
Manfaat pajak tangguhan					27.084.341
Laba tahun berjalan					1.972.439.033
Penghasilan komprehensif lain yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi pada periode selanjutnya					68.729.423
Laba komprehensif					2.041.168.456
Aset					
Aset segmen	25.220.348.406	20.850.060.148	5.123.394.006	-	51.193.802.560
Aset tidak dapat dialokasi	-				1.045.574.440
Total aset	25.220.348.406	20.850.060.148	5.123.394.006		52.239.377.000
Liabilitas					
Liabilitas segmen	680.413.340	1.463.707.422	1.990.518.214	-	4.134.638.976
Liabilitas tidak dapat dialokasi	<u></u> _				12.369.576.818
Total liabilitas	680.413.340	1.463.707.422	1.990.518.214	-	16.504.215.794

#### 25. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN PENGELOLAAN MODAL

#### MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Tingkat probabilitas risiko yang sangat potensial terjadi dari instrumen keuangan Perusahaan adalah risiko pasar (yaitu risiko tingkat suku bunga), risiko kredit dan risiko likuiditas. Kebijakan akan pentingnya mengelola tingkat risiko ini telah meningkat secara signifikan dengan mempertimbangkan beberapa parameter perubahan dan volatilitas pasar keuangan di Indonesia. Direksi Perusahaan menelaah dan menyetujui kebijakan risiko yang mencakup toleransi risiko dalam strategi mengelola risiko-risiko yang dirangkum di bawah ini.

# Risiko Pasar

Risiko pasar merupakan risiko yang terutama disebabkan karena perubahan harga pasar. Perusahaan dipengaruhi oleh risiko pasar, terutama risiko tingkat suku bunga.

# Risiko Tingkat Suku Bunga

Risiko terhadap tingkat suku bunga merupakan risiko nilai wajar atau arus kas masa datang dari instrumen keuangan yang berfluktuasi akibat perubahan tingkat suku bunga pasar. Eksposur Perusahaan yang terpengaruh tingkat suku bunga terutama terkait pada utang bank jangka panjang dan utang pembiayaan konsumen.

Tanggal 31 Desember 2020 Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

# 25. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN PENGELOLAAN MODAL (lanjutan)

#### **MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**

#### Risiko Pasar (lanjutan)

#### Risiko Tingkat Suku Bunga (lanjutan)

Perusahaan memonitor secara ketat fluktuasi suku bunga pasar dan ekspektasi pasar sehingga dapat mengambil langkah-langkah yang paling menguntungkan Perusahaan secara tepat waktu. Manajemen tidak menganggap perlunya melakukan swap suku bunga saat ini.

Tabel berikut adalah nilai tercatat, berdasarkan jatuh temponya, atas liabilitas keuangan Perusahaan yang terkait risiko tingkat suku bunga pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

	31 Desember 2020						
	Rata-rata Suku Bunga Efektif	Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	Jatuh Tempo Pada Tahun Kedua	Jatuh Tempo Pada Tahun Ketiga	Jatuh Tempo Pada Tahun Keempat	Jatuh Tempo Lebih dari Tahun Kelima	Total
Liabilitas Utang bank jangka panjang	11% - 11.50%	2.944.785.588	2.944.785.588	2.944.785.588	2.944.785.588	2.330.054.271	14.109.196.624
Utang pembiayaan Konsumen	12,60%	1.525.717.700	1.430.780.100	88.128.000	2.0 1 00.000		3.044.625.800
			3	1 Desember 2019	)		
	Rata-rata Suku Bunga Efektif	Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	Jatuh Tempo Pada Tahun Kedua	Jatuh Tempo Pada Tahun Ketiga	Jatuh Tempo Pada Tahun Keempat	Jatuh Tempo Lebih dari Tahun Kelima	Total
Liabilitas Utang bank jangka panjang	11% - 12,50%	2.980.883.446	2.980.883.446	2.980.883.446	2.980.883.446	5.340.524.747	17.264.058.531
Utang pembiayaan Konsumen	12,60%	844.612.800	844.612.800	685.214.300	-	-	2.374.439.900

#### Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko dalam hal pihak ketiga tidak akan memenuhi liabilitasnya berdasarkan instrumen keuangan atau kontrak pelanggan, yang menyebabkan kerugian keuangan. Perusahaan dihadapkan pada risiko kredit dari kegiatan operasi dan dari aktivitas pendanaan, termasuk deposito pada bank, transaksi valuta asing, dan instrumen keuangan lainnya. Risiko kredit terutama berasal dari bank, piutang usaha dari pelanggan dan piutang lain-lain.

Risiko kredit yang berasal dari piutang usaha dikelola oleh manajemen Perusahaan sesuai dengan kebijakan, prosedur, dan pengendalian dari Perusahaan yang berhubungan dengan pengelolaan risiko kredit pelanggan. Batasan kredit ditentukan untuk semua pelanggan berdasarkan kriteria penilaian secara internal. Saldo piutang pelanggan dan piutang lain-lain dimonitor secara teratur oleh manajemen Perusahaan.

Risiko kredit yang berasal dari bank dikelola oleh manajemen Perusahaan dengan menilai kredibilitas pihakpihak yang akan menerima penempatan dana dari Perusahaan.

Tabel berikut ini memberikan informasi mengenai maksimum kredit yang dihadapi oleh Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

	2020	2019
Deposito Bank Piutang usaha Piutang lain-lain	23.000.000.000 2.230.496.810 342.533.093	1.953.288.555 291.853.558 1.500.000
Total	25.573.029.903	2.246.642.113

Tanggal 31 Desember 2020 Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

# 25. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN PENGELOLAAN MODAL (lanjutan)

#### **MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**

#### Risiko Kredit (lanjutan)

Perusahaan melakukan hubungan usaha dengan pihak-pihak yang diakui dan kredibel. Perusahaan memiliki kebijakan untuk semua pelanggan yang akan melakukan perdagangan secara kredit harus melalui prosedur verifikasi kredit. Sebagai tambahan jumlah piutang dipantau secara terus menerus untuk mengurangi risiko penurunan nilai piutang.

Tabel berikut ini menunjukkan eksposur maksimum risiko kredit untuk komponen-komponen dalam laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

	2020	2019
Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai	25.230.496.810	2.093.310.436
Telah jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai	342.533.093	153.331.677
Total	25.573.029.903	2.246.642.113

#### Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Perusahaan tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi liabilitasnya.

Dalam pengelolaan risiko likuiditas, manajemen memantau dan menjaga jumlah kas dan bank yang dianggap memadai untuk membiayai operasional Perusahaan dan untuk mengatasi dampak fluktuasi arus kas. Manajemen juga melakukan evaluasi berkala atas proyeksi arus kas dan arus kas aktual, termasuk jadwal jatuh tempo pinjaman dan utang dan terus-menerus melakukan penelaahan pasar keuangan untuk mendapatkan sumber pendanaan yang optimal.

Tabel di bawah merupakan profil jatuh tempo liabilitas keuangan Perusahaan berdasarkan pembayaran kontraktual yang tidak terdiskonto pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

	31 Desember 2020			
		Lebih dari 1 tahun		·
		sampai dengan 5	Lebih dari 5	
	Di bawah 1 tahun	tahun	tahun	Total
Liabilitas	<u> </u>			
Utang usaha - pihak ketiga	106.815.093	-	-	106.815.093
Utang lain-lain - pihak ketiga	15.978.998	-	-	15.978.998
Beban akrual	477.960.527	-	-	477.960.527
Utang bank jangka panjang	2.944.785.588	8.834.356.764	2.330.054.271	14.109.196.623
Utang pembiayaan konsumen	1.525.717.700	1.518.908.100	-	3.044.625.800
Utang pembelian aset tetap	-	58.525.000	=	58.525.000
Total liabilitas	5.071.257.906	10.411.789.864	2.330.054.271	17.813.102.041
		04 D		
		31 Desemb	er 2019	
		Lebih dari 1 tahun	1.19.1.25	
	B11 - 1 444	sampai dengan 5	Lebih dari 5	<b>-</b>
	Di bawah 1 tahun	tahun	tahun	Total
Liabilitas				
Utang usaha - pihak ketiga	151.334.284	-	-	151.334.284
Utang lain-lain - pihak ketiga	17.419.123	-	-	17.419.123
Beban akrual	348.179.680	<del>-</del>		348.179.680
Utang bank jangka panjang	2.980.883.446	8.942.650.338	5.340.524.747	17.264.058.531
Utang pembiayaan konsumen	844.612.800	1.529.827.100	-	2.374.439.900
Utang pembelian aset tetap	<u> </u>	68.025.000	<u> </u>	68.025.000
Total liabilitas	4.342.429.333	10.540.502.438	5.340.524.747	20.223.456.518

Tanggal 31 Desember 2020 Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

# 25. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN PENGELOLAAN MODAL (lanjutan)

#### **PENGELOLAAN MODAL**

Tujuan utama pengelolaan modal Perusahaan adalah untuk memastikan pemeliharaan peringkat kredit yang tinggi dan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham. Perusahaan tidak diwajibkan untuk memenuhi syarat-syarat modal tertentu.

Manajemen Perusahaan mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian, berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Perusahaan dapat memilih menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham atau menerbitkan saham baru.

Tidak ada perubahan yang dibuat dalam tujuan, kebijakan, atau proses selama periode yang disajikan.

Kebijakan Perusahaan adalah untuk menjaga rasio modal yang sehat dalam rangka untuk mengamankan pembiayaan pada biaya yang wajar.

Sebagaimana praktik yang berlaku umum, Perusahaan mengevaluasi struktur permodalan melalui rasio utang terhadap modal (*gearing ratio*) yang dihitung melalui pembagian antara utang bersih dengan modal. Utang bersih adalah jumlah liabilitas sebagaimana disajikan di dalam laporan posisi keuangan dikurangi dengan jumlah kas dan setara kas, sedangkan modal meliputi seluruh komponen ekuitas dalam laporan posisi keuangan. Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, perhitungan rasio tersebut adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Total liabilitas	15.548.172.037	16.504.215.794
Dikurangi kas dan bank	25.247.656.375	1.967.186.253
Utang bersih	(9.699.484.338)	14.537.029.541
Total ekuitas	58.642.155.539	35.735.161.206
Rasio utang terhadap modal	(0,17)	0,41

#### 26. INSTRUMEN KEUANGAN

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar instrumen keuangan Perusahaan yang tercatat dalam laporan keuangan:

	31 Desember 2020		
	Nilai Tercatat	Nilai Wajar	
ASET KEUANGAN			
Aset keuangan yang diukur pada			
biaya perolehan diamortisasi			
Kas dan setara kas	25.247.656.375	25.247.656.375	
Piutang usaha			
pihak ketiga	132.533.093	132.533.093	
pihak berelasi	210.000.000	210.000.000	
Total Aset Keuangan	25.590.189.468	25.590.189.468	
LIABILITAS KEUANGAN			
Liabilitas keuangan yang diukur berdasarkan			
biaya perolehan diamortisasi			
Utang usaha - pihak ketiga	106.815.093	106.815.093	
Utang lain-lain - pihak ketiga	15.978.998	15.978.998	
Beban akrual	477.960.527	477.960.527	
Utang bank jangka panjang	10.767.847.118	10.767.847.118	
Utang pembiayaan konsumen	2.677.862.304	2.677.862.304	
Utang pembelian aset tetap	58.525.000	58.525.000	
Total Liabilitas Keuangan	14.104.989.040	14.104.989.040	

Tanggal 31 Desember 2020 Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

# 26. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

Utang pembiayaan konsumen

Utang pembelian aset tetap

Total Liabilitas Keuangan

	*** = *********************************		
	Nilai Tercatat	Nilai Wajar	
ASET KEUANGAN			
Aset yang diklasifikasikan sebagai			
pinjaman dan piutang			
Kas dan bank	1.967.186.253	1.967.186.253	
Piutang usaha - pihak ketiga	291.853.558	291.853.558	
Piutang lain-lain	1.500.000	1.500.000	
Total Aset Keuangan	2.260.539.811	2.260.539.811	
LIABILITAS KEUANGAN			
Liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan			
biaya perolehan diamortisasi			
Utang usaha - pihak ketiga	151.334.284	151.334.284	
Utang lain-lain - pihak ketiga	17.419.123	17.419.123	
Beban akrual	348.179.680	348.179.680	
Utang bank jangka panjang	12.355.776.818	12.355.776.818	

31 Desember 2019

1 990 518 214

14.931.253.119

68.025.000

1 990 518 214

14.931.253.119

68.025.000

Berikut ini adalah metode dan asumsi yang digunakan untuk menentukan nilai wajar masing-masing kelompok dari instrumen keuangan Perusahaan:

- 1. Nilai wajar kas dan setara kas, piutang usaha pihak ketiga, piutang usaha pihak berelasi, piutang lain-lain, utang usaha pihak ketiga, utang lain-lain pihak ketiga, dan beban akrual mendekati nilai tercatatnya karena bersifat jangka pendek dan akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan.
- 2. Nilai tercatat utang bank jangka panjang dan utang pembiayaan konsumen mendekati nilai wajarnya karena suku bunga mengambang dari instrumen keuangan ini tergantung penyesuaian oleh pihak bank dan pembiayaan konsumen diterima.
- Nilai wajar utang pihak berelasi dan utang pembelian aset tetap dicatat sebesar biaya historis karena nilai wajarnya tidak dapat diukur secara handal.

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan didefinisikan sebagai harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu aset dan liabilitas dalam transaksi teratur di antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Perusahaan menggunakan hierarki berikut ini untuk menentukan nilai wajar instrumen keuangan:

- Level 1: Nilai wajar diukur berdasarkan pada harga kuotasi (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas sejenis.
- Level 2: Nilai wajar diukur berdasarkan teknik-teknik valuasi, di mana seluruh input yang mempunyai efek vang signifikan atas nilai wajar dapat diobservasi baik secara langsung maupun tidak langsung.
- Level 3: Nilai wajar diukur berdasarkan teknik-teknik valuasi, di mana seluruh input yang mempunyai efek yang signifikan atas nilai wajar tidak dapat diobservasi baik secara langsung maupun tidak langsung.

# 27. PENGUNGKAPAN TAMBAHAN LAPORAN ARUS KAS

a. Aktivitas pendanaan dan investasi non-kas yang signifikan

	2020	2019
Perolehan aset tetap melalui utang pembiayaan konsumen	2.974.797.572	1.909.670.000
Perolehan aset hak guna sewa melalui beban dibayar di muka	400.000.000	-
Amortisasi biaya provisi yang belum diamortisasi	144.382.258	48.326.163
Penambahan uang muka pembelian aset tetap		
melalui utang pembiayaan konsumen	-	213.325.000

Tanggal 31 Desember 2020 Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

# 27. PENGUNGKAPAN TAMBAHAN LAPORAN ARUS KAS (lanjutan)

#### b. Rekonsiliasi utang bersih

Utang pembiayaan konsumen	Utang bank jangka Panjang	Utang pihak berelasi
-	13.753.788.231	1.249.903.002
(132.476.787)	(1.446.337.576)	(1.249.903.002)
2.122.995.000	48.326.163	-
1.990.518.213	12.355.776.818	
(1.057.020.909)	(1.732.311.958)	-
1.744.365.000	144.382.258	-
2.677.862.304	10.767.847.118	-
	(132.476.787) 2.122.995.000 1.990.518.213 (1.057.020.909) 1.744.365.000	ingka Panjang   ingka Panjan

#### 28. IKATAN DAN PERJANJIAN PENTING

#### Perjanjian Pengelolaan Hotel

Berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Hotel antara Perusahaan dengan PT Waringin Delapan Delapan (Waringin) tanggal 8 Oktober 2013, Perusahaan menyerahkan pengelolaan D'Esta Hotel 88 kepada Waringin sesuai standar oprasional hotel yang dikelola oleh Waringin.

Atas pengelolaan hotel oleh waringin, beban-beban yang harus ditanggung adalah sebagai berikut:

- 1. Beban promosi bersama sebesar 1% dari pendapatan kamar.
- 2. Beban pemesanan kamar sebesar Rp10.000 per kamar untuk setiap pemesanan kamar melalui kantor pusat Hotel 88 Perusahaan yang dimiliki Waringin.
- 3. Basic fee sebesar 1% dari total pendapatan.
- Incentive fee sebesar:
  - a. 5% dari Gross Operating Profit (GOP) bila GOP lebih kecil dari 50%.
  - 6% dari GOP bila GOP sama dengan atau lebih besar dari 50% tetapi lebih kecil atau sama dengan 60%.
  - c. 7% dari GOP bila GOP lebih besar dari 60%.

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani dan akan jatuh tempo untuk jangka waktu 10 tahun terhitung sejak bangunan hotel diserahkan kepada Waringin sebagai pengelola. Tanggal penyerahan bangunan hotel kepada Waringin sebagai pengelola pada tanggal 26 April 2018, sehingga perjanjian ini akan berlaku sampai dengan tanggal 26 April 2028. Namun Perusahaan maupun Waringin memiliki opsi untuk meninjau jangka waktu perjanjian ini sesudah perjanjian ini berlangsung selama 5 tahun dengan mengajukan secara tertulis paling lambat 6 bulan sebelumnya.

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, beban-beban yang ditanggung Perusahaan masing-masing sebesar Rp167.343.061 dan Rp221.642.578, diakui sebagai beban jasa manajemen sebagai bagian dari Beban Pokok Pendapatan Hotel (Catatan 21).

#### 29. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN KEUANGAN

# Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021

Pada tanggal 2 Februari 2021, Pemerintah mengumumkan dan memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 (PP 35/2021) untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 185 (b) UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja, yang bertujuan untuk menciptakan kesempatan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat Indonesia secara merata, guna memenuhi kehidupan yang layak. PP 35/2021 mengatur perjanjian kerja untuk waktu tertentu (pegawai tidak tetap), outsourcing, waktu kerja, waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja, yang dapat mempengaruhi tunjangan minimum yang harus dibayarkan kepada pegawai.

Perusahaan masih menilai dampak penerapan PP 35/2021 terhadap laporan keuangan Perusahaan.

Tanggal 31 Desember 2020 Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

# 29. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN KEUANGAN (lanjutan)

#### Penunjukan Sekretaris Perusahaan

Pada tanggal 6 Januari 2021, berdasarkan Surat Ketetapan Perusahaan No. 001/EMU/S.KET/I/2021, Perusahaan memberhentikan dengan hormat Aldy Abdurrachman Saleh serta menunjuk Suryanto Witono sebagai Sekretaris Perusahaan.

#### Perpanjangan Perjanjian Sewa Ruko

Pada tanggal 1 Februari 2021, PT Esta Dana Ventura memperpanjang masa sewa ruko yang berlokasi di Karawang yang berlaku mulai tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2026 dengan harga sewa sebesar Rp222.222.222 selama 5 tahun. Pembayaran dilakukan dalam 2 tahap, tahap ke 1 dibayarkan setelah kontrak di tanda tangani, dan tahap ke 2 dibayarkan pada tahun ketiga atau paling lambat tanggal 24 Februari 2024.

# 30. KETIDAKPASTIAN KONDISI EKONOMI

Pada tanggal 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia ("WHO") telah menetapkan penyebaran wabah virus corona ("COVID-19") sebagai pandemi global. Wabah COVID-19 telah menyebabkan terjadinya perlambatan ekonomi global dan domestik, yang kemudian mempengaruhi operasi Perusahaan serta pelanggan dan pemasok Perusahaan. Meskipun gangguan ini diperkirakan hanya bersifat sementara, namun terdapat ketidakpastian yang cukup tinggi terkait luas dampaknya terhadap operasi dan kinerja keuangan Perusahaan.

Sehubungan dengan pandemi COVID-19 tersebut, selama tahun 2020, Perusahaan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Melakukan efisiensi biaya terutama dari sisi jumlah karyawan hotel.
- 2. Melakukan banyak promo menarik agar occupancy kamar meningkat.

Untuk tahun 2021, manajemen Perusahaan telah merencanakan hal-hal sebagai berikut:

- Memperbanyak kegiatan promosi agar tingkat hunian meningkat, serta menjual jasa ruangan untuk acara rapat dan kontes wedding dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.
- 2. Menawarkan perpanjangan sewa properti komersial dengan memberikan harga sewa bersaing, tetapi tetap menjaga kapasitas sewa agar terisi semua.
- 3. Dengan perekonomian semakin membaik di awal tahun 2021, permintaan kendaraan untuk disewakan juga akan semakin meningkat.

Kami percaya dalam situasi pandemi global ini, efisiensi dan peningkatan kualitas produk dan memberikan bimbingan kepada semua level karyawan untuk menjaga kesehatan sehingga kontinuitas usaha dapat berjalan lancar dan akan dapat membantu Perusahaan mencapai target yang direncanakan.

# 31. STANDAR, AMENDEMEN/ PENYESUAIAN DAN INTERPRETASI STANDAR TELAH DITERBITKAN TAPI BELUM DITERAPKAN

Standar akuntansi baru, amandemen, penyesuaian tahunan, dan interpretasi yang telah diterbitkan, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2021 yang mungkin berdampak pada laporan keuangan dan belum diterapkan secara dini oleh Perusahaan adalah sebagai berikut:

#### Mulai efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2021

Amandemen ini dikeluarkan untuk membantu entitas menentukan apakah serangkaian kegiatan dan aset yang diperoleh adalah bisnis atau tidak. Mereka mengklarifikasi persayaratan minimum untuk bisnis, menghapus penilaian apakah pelaku pasar mampu mengganti elemen yang hilang, menambah panduan untuk membantu entitas menilai apakah proses yang diperoleh adalah substantif, mempersempit definisi bisnis dan output, dan memperkenalkan uji konsentrasi nilai wajar opsional. Contoh ilustratif baru diberikan bersama dengan amandemen.

Tanggal 31 Desember 2020 Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

# 31. STANDAR, AMENDEMEN/ PENYESUAIAN DAN INTERPRETASI STANDAR TELAH DITERBITKAN TAPI BELUM DITERAPKAN (lanjutan)

#### Mulai efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2021 (lanjutan)

· Amandemen PSAK 22, tentang Definisi Bisnis

Amandemen ini mengklarifikasi definisi bisnis dengan tujuan untuk membantu entitas dalam menentukan apakah suatu transaksi seharusnya dicatat sebagai kombinasi bisnis atau akuisisi aset. Secara umum, amendemen PSAK 22 tersebut:

- menambahkan pengujian konsentrasi opsional yang mengizinkan penilaian yang disederhanakan apakah rangkaian aktivitas dan aset yang diakuisisi bukan merupakan suatu bisnis;
- mengklarifikasi unsur bisnis bahwauntuk dipertimbangkan sebagai suatu bisnis, suatu rangkaian terintegrasi dari aktivitas dan aset yang diakuisi mencakup, minimum, input dan proses substantif yang bersama-sama berkontribusi secara signifikan terhadap kemampuan untuk menghasilkan output; dan
- menambahkan pedoman dan contoh ilustratif untuk membantu entitas enilai pakah proses substantif telah diakuisisi.

Amandemen PSAK 22, "Kombinasi Bisnis: Definisi Bisnis" akan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2021 dan penerapan dini diperkenankan.

 Amandemen PSAK 71, "Instrumen Keuangan", Amandemen PSAK 55, "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran", Amandemen PSAK 60, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan", Amandemen PSAK 62, "Kontrak Asuransi" dan Amandemen PSAK 73, "Sewa" tentang Reformasi Acuan Suku Bunga - Tahap 2"

Reformasi Acuan Suku Bunga - Tahap 2 membahas isu yang mungkin mempengaruhi pelaporan keuangan selama reformasi acuan suku bunga, termasuk dampak perubahan arus kas kontraktual atau hubungan lindung nilai yang timbul dari penggantian acuan suku bunga dengan acuan alternatif yang baru. Amendemen ini mengubah persyaratan dalam PSAK 71, "Instrumen Keuangan", PSAK 55, "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran", PSAK 60, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan", PSAK 62, "Kontrak Asuransi" dan PSAK 73. "Sewa" yang terkait dengan:

- perubahan dasar untuk menentukan arus kas kontraktual dari aset keuangan, liabilitas keuangan dan liabilitas sewa:
- · akuntansi lindung nilai; dan
- pengungkapan

Reformasi Acuan Suku Bunga - Tahap 2 hanya berlaku untuk perubahan yang disyaratkan oleh reformasi acuan suku bunga untuk instrumen keuangan dan hubungan lindung nilai. Amendemen tersebut akan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2021 dengan penerapan dini diperkenankan.

Amandemen PSAK 73, "Sewa: Konsesi Sewa terkait COVID-19"

Sebagai akibat dari pandemi COVID-19, konsesi sewa telah diberikan kepada penyewa. Konsesi tersebut dapat diberikan dalam berbagai bentuk, termasuk pengampunan pembayaran dan penangguhan pembayaran sewa. Dewan standar membuat amandemen terhadap PSAK 73 yang memberi penyewa pilihan untuk memperlakukan konsesi sewa yang memenuhi syarat dengan cara yang sama seperti jika mereka bukan modifikasi sewa. Dalam banyak kasus, hal ini akan menghasilkan perlakuan akuntansi untuk konsesi sebagai pembayaran sewa variabel selama periode pemberiannya.

Entitas yang menerapkan kebijakan praktis harus mengungkapkan fakta ini, apakah kebijakan telah diterapkan pada semua konsesi sewa yang memenuhi syarat atau, jika tidak, informasi tentang sifat kontrak yang telah diterapkan, serta jumlah yang diakui dalam laba rugi, yang timbul dari konsesi sewa.

Amandemen PSAK 73, "Sewa: Konsesi Sewa terkait COVID-19" akan berlaku efektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Juni 2020 dengan penerapan dini diperkenankan.

Tanggal 31 Desember 2020 Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

# 31. STANDAR, AMENDEMEN/ PENYESUAIAN DAN INTERPRETASI STANDAR TELAH DITERBITKAN TAPI BELUM DITERAPKAN (lanjutan)

#### Mulai efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2022

• PSAK 74, "Kontrak asuransi", yang diadopsi dari IFRS 17, berlaku efektif tanggal 1 Januari 2022, dengan penerapan dini diperkenankan untuk entitas yang juga telah menerapkan PSAK 71 dan PSAK 72.

Ini adalah standar akuntansi baru yang komprehensif untuk kontrak asuransi yang mencakup pengakuan dan pengukuran, presentasi, dan pengungkapan. Setelah efektif, PSAK 74 akan menggantikan PSAK 62 "Kontrak Asuransi".

PSAK 74 berlaku untuk semua jenis kontrak asuransi (yaitu, jiwa, non-jiwa, asuransi langsung, dan asuransi ulang), terlepas dari jenis entitas yang menerbitkannya, juga mengenai jaminan dan instrumen keuangan tertentu dengan fitur partisipasi tidak mengikat.

Beberapa pengecualian ruang lingkup akan berlaku. Tujuan keseluruhan PSAK 74 adalah untuk menyediakan model akuntansi untuk kontrak asuransi yang lebih bermanfaat dan konsisten untuk perusahaan asuransi. Berbeda dengan persyaratan dalam PSAK 62, yang sebagian besar didasarkan pada kebijakan akuntansi lokal sebelumnya, IFRS 17 menyediakan model komprehensif untuk kontrak asuransi, yang mencakup semua aspek akuntansi yang relevan. Inti dari IFRS 17 adalah model umum, dilengkapi dengan:

- Adaptasi spesifik untuk kontrak dengan fitur partisipasi langsung (pendekatan biaya variabel).
- Pendekatan yang disederhanakan (pendekatan alokasi premi) terutama untuk kontrak jangka pendek.
- Amandemen PSAK 57, "Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi: Kontrak Memberatkan Biaya Memenuhi Kontrak"

Amandemen ini mengklarifikasi biaya untuk memenuhi suatu kontrak dalam kaitannya dalam menentukan apakah suatu kontrak merupakan kontrak memberatkan.

Amandemen PSAK 57 mengatur bahwa biaya untuk memenuhi kontrak terdiri dari biaya yang berhubungan langsung dengan kontrak. Biaya yang berhubungan langsung dengan kontrak terdiri dari:

- · Biaya inkremental untuk memenuhi kontrak tersebut; dan
- Alokasi biaya lain yang berhubungan langsung untuk memenuhi kontrak.

Amandemen PSAK 57, "Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi: Kontrak Memberatkan - Biaya Memenuhi Kontrak" akan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2022 dengan penerapan dini diperkenankan.

#### Mulai efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2023

Amandemen PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan"

Amandemen PSAK 1 mengklarifikasi bahwa kewajiban diklasifikasikan sebagai lancar atau tidak lancar, berdasarkan pada hak yang ada pada akhir periode pelaporan. Klasifikasi tidak terpengaruh oleh ekspektasi entitas atau peristiwa setelah tanggal pelaporan (misalnya penerimaan waver atau pelanggaran perjanjian). Amandemen tersebut juga mengklarifikasi apa yang dimaksud PSAK 1 perihal 'penyelesaian' liabilitas.

Amandemen tersebut dapat memengaruhi klasifikasi liabilitas, terutama untuk entitas yang sebelumnya mempertimbangkan intensi manajemen untuk menentukan klasifikasi dan untuk beberapa liabilitas yang dapat dikonversi menjadi ekuitas.

Standar ini harus diterapkan secara retrospektif sesuai dengan persyaratan normal dalam PSAK 25, "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan". Amandemen tersebut akan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2023 dan penerapan lebih awal diizinkan.

Perusahaan sedang mengevaluasi dan belum menentukan dampak dari penerapan standar akuntansi baru, amandemen, penyesuaian dan interpreatasi tersebut terhadap laporan keuangan.